

**PENGGUNAAN HASIL SURVEY POLITIK SEBAGAI ALAT
FRAMING DAN *PRIMING* KEMENANGAN PASANGAN
CALON PRESIDEN JOKO WIDODO – MA'RUF AMIN
PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

Joko Susanto

NIM : 1657020053

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1441 H / 2019 M**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN MUNAQSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Joko Susanto, NIM. 1657020053 yang berjudul **Penggunaan Hasil Survei Politik Sebagai Alat *Framing* dan *Priming* Kemenangan Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin Pada Pemilihan Presiden 2019** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang,

Pembimbing I

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Pembimbing II

Badarudin Azarkasyi, M.M.
NIDN.2026068402

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Joko Susanto
NIM : 1657020053
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Penggunaan Hasil Survei Politik Sebagai Alat *Framing* dan *Priming*
Kemenangan Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin Pada
Pemilihan Presiden 2019.

Telah di munaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Selasa/ 03 Desember 2019
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Raden Fatah.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata I (SI) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 03 Desember 2019
DEKAN,

Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA,

SEKRETARIS

Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum
NIP. 197201192007011011

Erik Darmawan, M.H.I
NIDN. 0217057402

PENGUJI I,

PENGUJI II,

Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 19761207011010

Reni Apriani, M.Si
NIDN. 2021049401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Susanto

NIM : 1657020053

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Penggunaan Hasil Survei Politik Sebagai Alat *Framing* dan *Priming* Kemenangan Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 1 November 2019

Joko Susanto
NIM. 1657020053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dalam proses perjalanan hidup yang saya tempuh, saya selalu meyakini dengan iman, mengusahakannya dengan ilmu, dan akan sampai pada tujuan hanya dengan amal”

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk :

1. Yang selalu memberikan jalan terbaik dan selalu melindungiku, dzat yang maha besar Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku Abdul Mutolib dan Susilawati yang sangat kucinta, kubanggakan dan kusayangi selalu membimbing dan mendoakan langkah dalam kehidupanku.
3. Adikku yang kusayangi Wiko Sugianto, Desi Oktari, Hikmah Setiansyah, dan Okta Raisya Indisya.
4. Pembimbingku Bapak Prof. Dr. Izomiddin, MA dan Bapak Badarudin Azarkasyi, M.M.
5. Orang yang telah saya anggap seperti orang tua sendiri dan sekaligus orang tua akademik Bapak Dr. Kun Budianto, M.Si
6. Mentorku Bapak Erik Darmawan, S.IP., M.HI.
7. Putri Yana yang selalu menjadi alarm untuk menyelesaikan tanggung jawabku.
8. Saudaraku sekaligus sahabatku yang kusayangi Ujang Azhari.

9. Pamanku yang terbaik Erpendi, S.IP
10. Teman seperjuangan sekaligus teman bercanda Hendra, Geby, Yoga, dan Nejatullah Sidqi.
11. Organisasiku sebagai kampus kedua Himpunan Mahasiswa Islam
12. Sahabat- sahabatku pejuang skripsi bagian dari semangatku.
13. Semua teman- temanku ilmu politik angkatan 2016.
14. Adik-adikku yang ada dalam bingkai hijau hitam.
15. Teman- teman yang diluar sana yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu
16. Almamater biruku.

ABSTRAK

Hasil survei politik digunakan sebagai alat *framing* dan *priming* merupakan bagian dari hal yang penting dalam Pemilihan Presiden 2019, dimana dalam proses pembentukannya disesuaikan dengan isu yang sedang berkembang, baik dalam legalitas maupun legitimasi. Dapat dilihat ketika muncul isu permasalahan dalam masa pemilihan presiden yang begitu banyak dinamika yang terjadi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan Hasil Survei Politik Sebagai alat *Framing* dan *Priming* serta untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan pada pasca Pemilihan Presiden 2019. Menggunakan teori Robert D Benford dan David A Snow dan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui metode kepustakaan. Dari hasil penelitian penulis, dapat dilihat bahwa dalam beberapa peristiwa, *Framing* dan *Priming* muncul pada saat terjadinya berbagai peristiwa pada Pilpres 2019 dengan arah tujuan agar dapat menstabilkan elektabilitas serta legitimasi masyarakat terhadap presiden terpilih. Dampak yang muncul adalah bagi masyarakat yang menyukai sosok Jokowi akan semakin menyukai dan bagi yang kurang menyukai akan tetap tidak menyukai bahkan semakin tidak menyukainya.

Kata Kunci : *Framing*, *Priming*, Pilpres 2019

ABSTRACT

The results of political surveys used as framing and priming are an important part of the 2019 Presidential election, which in the process of forming them is adapted to emerging issues, both in legality and legitimacy. It can be seen that a compilation of issues arose during the presidential election with so many dynamics going on. This thesis aims to study the use of Political Survey Results for Framing and Priming and to find out how it was generated in the post-2019 Presidential Election. Using Robert D Benford and David A Snow's theory and using descriptive qualitative research methods, the data obtained using the literature method. From the results of the author's research, it can be seen in several events, Framing and Priming appeared when discussing various events in the 2019 Presidential Election with the aim of stabilizing the electability and legitimacy of the people towards the elected president. The impact that arises is for people who like the image of Jokowi will be more liked and for those who are less liked will still be disliked even more liked.

Keywords: Framing, Priming, 2019 Presidential Election.

DAFTAR ISI

Halaman Nota Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto Dan Persembahan	v
Abstrak	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Kata Pengantar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori	18
G. Metodologi Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sumber Data	26
3. Metode Pengumpulan Data	27
4. Metode Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan Laporan	29
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sistem Pemilihan Umum.....	31
1. Sistem Distrik.....	32
2. Sistem Proporsional.....	33
3. Sistem Campuran	34
4. Sistem di Luar <i>Meanstream</i>	34
B. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Reformasi	35
1. Pemilihan Umum 1999	36
2. Pemilihan Umum 2004	37
3. Pemilihan Umum 2009	38
4. Pemilihan Umum 2014	39
5. Pemilihan Umum 2019	40
C. Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pemilu.....	41
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	41
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	43

D. Lembaga-Lembaga Survei Pemilihan Umum	44
E. Media-Media yang Aktif Memberitakan Hasil Survei.....	51
1. Koran atau Surat Kabar	51
a. Koran Sindo	52
b. Harian Kompas.....	53
c. Harian Republika	53
2. Media Online.....	54
3. Televisi.....	55
a. TV One.....	55
b. Kompas TV	56
c. Metro TV.....	57
d. I News TV	58
F. Calon Presiden Pada Pilpres 2019.....	59
1. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin	59
a. Profil Joko Widodo	59
b. Profil Ma'ruf Amin	60
2. Visi dan Misi Joko Widodo- Ma'ruf Amin.....	61

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Hasil Survei Politik Sebagai Alat <i>Framing</i> dan <i>Priming</i> oleh Pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf Pada Pilpres 2019	63
1. <i>Framing</i> Hasil Survei Politik	64
2. <i>Priming</i> Hasil Survei Politik	78
B. Dampak dari Penggunaan <i>Framing</i> dan <i>Priming</i> Oleh Pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf Pada Pilpres 2019.....	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Hitungan Cepat Pemilu 2019	46
Tabel 2.2 Situs Berita Online Teratas di Indonesia.....	55
Tabel 3.1 Dampak <i>Framing</i> dan <i>Priming</i> (#BesokMatikan TV Sehari).....	95
Tabel 3.2 Dampak <i>Framing</i> dan <i>Priming</i> (#PresidenAlamGaib)	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Deklarasi Mendukung Prabowo-Sandi, Komunitas Emak dan Eneng Sukabumi	66
Gambar 3.2 Surat Suara yang Tercoblos Sebelum Pemilihan di Malaysia.....	78
Gambar 3.3 Bukti Kecurangan yang diposting oleh Netizen.....	79
Gambar 3.4 Perbedaan Antara C1 dari TPS dan Input Data Situng Oleh KPU.....	80
Gambar 3.5 Massa Gerakan Kedaulatan Rakyat Demo di Gedung Bawaslu RI ...	82
Gambar 3.6 Prabowo Jenguk Korban Aksi 22 Mei	83

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul, **“Penggunaan Hasil Survei Politik Sebagai Alat *Framing* dan *Priming* Kemenangan Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin Pada Pemilihan Presiden 2019“** Skripsi ini disusun sebagai tugas paripurna sebagai Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I skripsi saya.
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
6. Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

7. Erik Darmawan, S.IP., M.H.I sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Badarudin Azarkasyi, M.M, sebagai Dosen pembimbing II skripsi saya.
9. Seluruh Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
10. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. *Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Palembang, 1 November 2019
Penulis

Joko Susanto
NIM. 1657020053

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pemilihan presiden yang dilakukan secara demokrasi perwakilan nampaknya memang sudah memiliki urgensi tersendiri di negara Indonesia. Terbukti pada saat terpilihnya presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama yang di pilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKI) memang karena daruratnya kekuasaan kepemimpinan yang ada di Indonesia. Namun tidak berapa lama setelah Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia seorang tokoh besar yang dikenal sebagai vokal utama yaitu Sutan Syahrir mengusulkan kepada wakil presiden yakni Moh. Hatta untuk membuat maklumat X yang dimana maklumat ini sebagai landasan awal terbentuknya partai politik di Indonesia.¹

Partai politik merupakan bagian yang sangat penting dalam pemilihan umum. Partai politik merupakan lembaga resmi yang diakui oleh Undang-undang sebagai lembaga pengkaderan yang mampu mencalonkan kandidatnya pada kursi legislatif dan eksekutif.² Namun pada zaman orde lama hingga masa orde baru, pemilihan Presiden dan wakil Presiden masih dipilih secara perwakilan yaitu dipilih oleh MPR.

¹ Miftah Toha, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014, Hlm. 144

² Kopel. *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan*, Penelitian Kerjasama Kemitraan dan Kopel, 2013.

Setelah masa reformasi berlangsung pada tahun 2004 hingga sekarang, pemilihan presiden dan wakil presiden di pilih langsung oleh rakyat sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden³. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih pemimpin negara ini dengan cara datang ke TPS dan mencoblos pasangan presiden dan wakil presiden yang mereka inginkan karena telah di atur pada UU RI No. 23 Tahun 2003 bab 2 pasal 7 bahwa pada saat hari pemungutan suara yang sudah berusia 17 tahun sudah mempunyai hak memilih.⁴

Pada tahun 2004 ada dua macam pemilihan umum, yang pertama pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi *parlementary threshold*. Partai yang memenuhi ambang batas masuk menjadi anggota parlemen dan partai politik yang berada di luar gedung parlemen. Yang kedua melakukan pemilihan presiden, dan ternyata pada calon presiden tahun 2004 dilakukan dua putaran. Pemilihan presiden dilakukan dengan dua putaran maksudnya adalah, siapapun kompetitor politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua maka secara otomatis akan masuk pada pemilihan presiden putaran kedua. Pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak hanya dapat menjaring suara absolut saja tetapi juga harus mendapatkan 20 persen suara yang setidak-

³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bagian (b)*, merujuk kepada amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Citra Umbara Bandung, 2003 Hlm. 1

⁴ *Ibid* Hlm 9

tidaknya setengah dari provinsi yang ada.⁵ Selanjutnya pada pemilu tahun 2009 masih ditetapkan pemilihan presiden dilakukan dengan dua putaran namun ternyata pasangan SBY-Boediono mendapatkan suara tertinggi yaitu 60,80% dan otomatis tidak dilakukan putaran kedua.⁶

Namun berbeda pada Pemilihan presiden ketiga kalinya tahun 2014 dimana dua kandidat yang maju mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden yaitu pasangan calon presiden Jokowi – Jusuf Kalla mendapatkan nomor urut 2 dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa mendapatkan nomor urut 1 dan hanya melakukan pemilihan presiden satu kali putaran saja karena hanya ada dua calon yang maju pada kontestasi politik di pilpres kali ini.

Jokowi – JK mendapatkan suara 70.997.833 suara sedangkan Prabowo – Hatta mendapatkan suara 62.576.444 suara nasional.⁷ Namun, terdapat perbedaan perolehan suara nasional yang muat oleh Kompas yaitu paslon Jokowi – JK mendapatkan 70.997.851 suara sedangkan Prabowo – Hatta mendapatkan suara 62.576.444 suara.⁸ Dari selisih suara tersebut tidak begitu diperhatikan karena hanya beberapa suara saja.

Padahal jika dilihat dari koalisi, Jokowi hanya empat partai yang mengusung dan satu partai pendukung dan Prabowo – Hatta diusung oleh enam partai dan satu partai pendukung. Karena bukan koalisi yang

⁵ Andrew Reynold dkk, *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, Swedia: Stockholm, 2005, Hlm. 81

⁶ Miftah Toha, *Op.cit.*, Hlm. 139

⁷ <https://republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/n940si/ini-hasil-lengkap-rekapitulasi-suara-pilpres-2014> diakses pada 30 juni 2019 pukul 16.00 wib

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014?page=all> diakses pada 30 juni 2019 pukul 16.30 wib

menjadi acuan agar dapat terpilih menjadi presiden melainkan hasil pemungutan suara. Jokowi memang presiden yang diminati oleh rakyat terbukti hasil survey membuktikan Jokowi mendapatkan presentase 18% sedangkan Prabowo hanya 6,9%.⁹ Gaya blusukan yang digunakan oleh Jokowi sebagai senjata utama. Selain itu, menurut Afrianto Purbolaksono visi misi Prabowo normatif sedangkan Jokowi lebih inovatif ini lah faktor lain yang meningkatkan popularitasnya pada saat bertarung di pemilihan presiden 2014.¹⁰

Pertarungan antara Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta merupakan pertarungan sengit yang memang benar-benar banyak memunculkan jiwa fanatisme terhadap masyarakat Indonesia. Terbukti pada masa kampanye para pendukung kedua belah pihak sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Meskipun para fanatisme politik kedua kubu tidak menjadi kekerasan fisik namun mayoritas kampanye yang dilakukan oleh para pendukung di kedua kubu menggunakan kampanye hitam. Ray rangkuti direktur Lingkar Madani Unrtuk Indonesia (LIMA) mempunyai asumsi bahwa pada pilpres 2014 merupakan pilpres yang sangat jauh berbeda dari pilpres – pilpres sebelumnya.

“Pada pilpres 2014 menang kalah adalah kematian. Ketat, Sengit, dan sampai sekarang masih terasa imbasnya. Di parlemen pun muncul dua kubu diantara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pada masa bakti DPR 2014-2019 diantara kedua kubu

⁹ Adinda Tenrianke Muchtar, et al, *Sketsa Pemilu 2014 : Antara Subtansi, Proses dan Kenyataan (Kumpulan Artikel Terpilih)*, Jakarta : The Indonesian Institute, 2015 Hlm. 72

¹⁰ Ibid hlm. 70

ini semuanya hanya mengedepankan kepentingan kelompok dan golongan semata dan tidak mementingkan pihak lain.”¹¹

Pada pemilihan presiden atau sering disingkat dengan pilpres di 2019 ini pertarungan sengit antar dua kubu di gedung parlemen masih bertambah kental dan semakin menjadi-jadi. Prabowo subianto yang seorang mantan Komandan Jenderal kopasus ini melakukan manufer di pra pilpres 2019 lalu.

Seorang wakil ketua umum gerindra Fadlizon mengemukakan pendapatnya bahwa sangat mustahil jika pada pilpres 2019 lalu Prabowo Subianto di isukan akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Dendam lama masih membara yang dimana para tim koalisi merah putih pada pilpres 2014 melayangkan isu dengan hastag “2019 Ganti Presiden”. Fadlizon juga menyampaikan pada salah satu media pada kala itu bahwa bakal calon presiden Prabowo harus memberikan power yang besar terhadap pertarungan di 2019.¹²

Para pendukung Jokowi melakukan pembalasan dengan hastag “2019 Tetap Jokowi”. Perang tagar antara kedua belah pihak ini dimulai pada saat pengundian nomor urut yang dilakukan oleh KPU. Pada saat selesainya pengambilan nomor urut perang hastag di media sosial twitter

¹¹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "*7 Peristiwa Politik Sepanjang 2014*", <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/23/06385381/7.Peristiwa.Politik.Sepanjang.2014> diakses pada tanggal 1 juli 2019 pukul 07.10 wib

¹² Artikel ini tayang di tirto.id dengan judul "*Amien Rais dan Fadli Zon Bahas Pertarungan ulang Jokowi vs Prabowo*" <https://tirto.id/amien-rais-dan-fadli-zon-bahas-pertarungan-ulang-jokowi-vs-prabowo-cJr3> diakses pada tanggal 1 juli 2019 pada pukul 10.00 wib

bermunculan dan diantara kedua belah pihak.¹³ Dengan adanya tagar inilah yang menjadi pemicu pemecahnya kerukunan antar bangsa dan negara karena dari kedua belah pihak pendukung yang memang benar – benar loyalitasnya tinggi terhadap para calon yang didukung nya maka mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kedua pendukung merasa semuanya benar dan mereka cenderung tidak ingin disalahkan. Sebagai para pendukung yang sangat loyal dan merasa para calonnya paling benar ketika salah satu calon melakukan kesalahan maka akan langsung menjadi *Trending Topic*, dan para pendukung secara tidak sadar membicarakan hal yang sepele yang membuat terkurasnya energi positif masyarakat.¹⁴

Semakin maju nya perkembangan zaman dan tentu manusia akan semakin maju juga pola fikir nya terhadap teknologi pada saat ini sehingga pada saat pemilihan presiden para pendukung tidak hanya melayangkan hastag ke media sosial. Untuk menambah keyakinan dan tingkat kepercayaan serta elektabilitas masyarakat terhadap calon presiden, lembaga survey sering kali digunakan untuk menjadi alat bukti keyakinan masyarakat terhadap calon presiden tersebut. Jika seseorang mengikuti perkembangan media maka prinsip seseorang adalah ketika ada sebuah *frame* terbentuk yang dimana contohnya hasil survey yang dilayangkan

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-4223775/perang-tagar-jokowi-vs-prabowo-usai-pengundian-nomor-urut> diakses pada tanggal 3 juli 2019 pukul 16.00 wib

¹⁴ Khoiril Huda, Azzah Fadlika, “Pemilu 2019 : Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa”. Volume 4 Nomor 3 tahun 2018 hlm. 557

pada media maka individu inginkan adalah agar *frame* yang dipunyainya menjadi *frame* kelompok bahkan masyarakat¹⁵

Lembaga survey merupakan suatu badan penelitian dengan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan pendapat dari sample yang representatif dari populasi yang menjadi target sasaran.¹⁶ Hasil survey ada yang dipublikasikan kemasyarakat dan ada pula yang hanya dikonsumsi oleh partai politik atau kandidat. Hasil survey dilakukan kurang lebih tiga bulan sekali untuk mengetahui *trend* popularitas elektabilitas, kredibilitas, dan kapabilitas para calon.

Hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey telah diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 2012. Selain itu, hasil survey tidak boleh diumumkan pada hari tenang atau hari H karena telah diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2012. Kemudian, lembaga survey harus mencantumkan jumlah responden, dana, tanggal pelaksanaan, cakupan survey dan *margin of error*.¹⁷ Karena, lembaga survey harus memberikan tingkat kevalidan yang jelas kepada masyarakat dan para pengguna lembaga survey tersebut supaya masyarakat dapat mempercayainya.

Menurut Qudari, lembaga survey politik adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam negara demokrasi. Lembaga survey politik

¹⁵ Eriyanto, *Media dan Opini Publik Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkai(Framing) dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018. Hlm. 78

¹⁶ Hafied Cangra, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Hlm 179

¹⁷ VivaNews.com, diakses pada tanggal 4 juli 2019 pukul 12.00

merupakan jantung dan denyut nadinya demokrasi. Kita sebagai masyarakat dapat mengetahui bagaimana kondisi suhu politik pada saat ini dan dapat menjadi acuan untuk mengeluarkan kebijakan publik dengan menggunakan lembaga survey.¹⁸ Artinya, lembaga survey tidak hanya digunakan pada saat adanya pemilihan umum saja akan tetapi dapat dilakukan pada saat adanya isu yang beredar yang mengundang persoalan masalah baru didalam suatu negara.

Lembaga survey mempunyai peranan yang sangat strategis antara pemerintah dan masyarakat demi kepentingan bersama dan sebagai lembaga yang reposisional, profesional, serta obyektifitasnya harus terus dikembangkan. Karena fungsi utama lembaga survey adalah mendorong masalah yang menyangkut kepentingan publik sehingga masyarakat, media dan pemerintah mendiskusikan masalah tersebut. Di sisi lain, lembaga survey adalah lembaga yang paling tepat dalam misi proses pengawalan demokrasi.¹⁹

Namun, pada realitasnya saat ini lembaga survey tidak semuanya netral masih saja ada yang melakukan survey hanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para kandidat maupun partai politik yang menginginkan lembaga survey melakukan survey terhadap kelompoknya saja atau sering disebut dengan lembaga survey "Pesanan" inilah yang menjadi persoalan yang paling urgensi pada saat ini.

¹⁸ Denny J.A, *Napak Tilas Reformasi Indonesia, Talk Show Dialog Aktual Radio Delta FM*, Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2006. Hlm. 84

¹⁹ Lanang Putra Prabawa, *Lembaga Survey: Antara Integritas, Kekuasaan dan Komersial*, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-2549309/lembaga-survei-antara-integritas-kekuasaan-dan-komersial> diakses pada tanggal 8 juli 2019 pukul 14.55 wib

Padahal, peranan dan fungsi lembaga survey telah disinggung dalam sebuah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif dan kemudian ditindak lanjut oleh KPU dengan dikeluarkannya peraturan KPU Nomor 40 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif pasal 244 ayat 2 yang berbunyi.

“Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jejak pendapat tentang pemilu dan perhitungan cepat hasil pemilu dengan ketentuan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu”.²⁰

Artinya, lembaga survey berada di posisi antara masyarakat dan pemimpin. Lembaga tentu dalam melihat semua peristiwa sosial yang terjadi dalam masyarakat harus bersifat objektif. Lembaga survey memang mempunyai peranan penting dalam membangun opini masyarakat. Namun, masyarakat yang mayoritas mempunyai pendidikan politik tidak semudah itu percaya terhadap lembaga survey tentu mereka akan membandingkan lembaga survey yang lain dan juga melakukan analisa dengan pendekatan – pendekatan normatif kemudian mencocokkan dengan *track record* para calon kandidat itu sendiri.

Betapa pentingnya lembaga survey dalam memenangkan pemilihan umum hingga akhirnya banyak partai politik yang menggunakan lembaga survey sebagai acuan untuk mengetahui elektabilitasnya seperti PDI Perjuangan yang menggunakan LSI untuk menggelar survey pada 12 – 19 Agustus 2018 dengan menggunakan metode *multistage random sampling*

²⁰ Siti Chamidah, *Pemilu 2009, Pemasaran Politik dan Lembaga Survey*, <http://eprints.umpo.ac.id/1386/3/PEMILU%202009%20%20%28%20Jurnal%20jepma%29.pdf> diakses pada tanggal 4 juli 2019 pukul 16.00 wib

melibatkan 1.200 responden.²¹ Partai Keadilan Sejahtera menggunakan median untuk melihat seberapa jauh elektabilitasnya dikalangan masyarakat yang digelar pada maret 2019 dengan metode *random sampling* dengan melibatkan 1.000 responden.²²

Hasil survey politik merupakan alat yang paling ampuh dalam kontestasi pada pemilihan umum. Hasil survey memang paling sering digunakan sebagai alat *framing* dan *priming* karena sesuai dengan fungsi dan tujuannya yang membingkai sebuah peristiwa yang berkaitan dengan kandidat serta membuat *trending topic* terhadap berita yang berkaitan dengan kandidat tersebut. Dengan demikian hasil survey dapat mempengaruhi serta menggiring opini publik serta dapat meningkatkan elektabilitas, popularitas, maupun kredibilitas para kandidat.

Peranan yang sangat penting lembaga survey pada pemilihan presiden dan dapat diakses masyarakat melalui media yang dapat mempengaruhi opini publik inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai hasil survey politik yang digunakan sebagai alat *framing* dan *priming* pasangan calon presiden Jokowi – Ma'ruf pada pemilihan presiden 2019.

Penggunaan survei oleh pasangan calon presiden Jokowi – Ma'ruf yang kini telah disahkan menjadi presiden ini di layangkan di media baik

²¹ "Survey LSI: PDIP Berpotensi Menang di pemilu 2019" dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/12/pexv00409-survei-lsi-pdip-berpotensi-menang-di-pemilu-2019> diakses pada 8 juli 2019 pukul 15.19 wib

²² "Partai apa yang dipilih milenial ibu kota ? median membuktikan" dalam <https://news.detik.com/berita/d-4467331/partai-apa-yang-dipilih-milenial-ibu-kota-survei-median-membuktikan> diakses pada 8 juli 2019 pukul 16.00 wib

media online maupun media cetak dengan menggunakan *framing* dan *priming*. Lembaga survey di gunakan oleh pasangan calon presiden Jokowi – Ma’ruf untuk melakukan survey dan setelah mendapatkan hasil surveinya kemudian di muat dalam bentuk berita di media.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah penggunaan Hasil Survey Politik sebagai alat *Framing* dan *Priming* oleh pasangan calon presiden Jokowi – Ma’ruf pada pemilihan presiden 2019?
2. Bagaimana dampak dari penggunaan *Framing* dan *Priming* oleh pasangan calon presiden Jokowi- Ma’ruf pada pemilihan presiden 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui model penggunaan *Framing* dan *Priming* sebagai kemenagan pasangan calon presiden Jokowi – Ma’ruf amin pada pemilihan presiden 2019 di indonesia.
2. Untuk memahami yang muncul dari penggunaan *Framing* dan *Priming* oleh pasangan calon presiden Jokowi-Ma’ruf pada Pemilihan Presiden 2019.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat dalam mengetahui pola permainan dalam kontestasi pemilihan umum dengan menggunakan hasil survey sebagai alat *framing* dan *priming*. Oleh

karena itu, penelitian ini akan memberikan manfaat terhadap berbagai kalangan antara lain : masyarakat, aktor politik, pemerintah, serta para kandidat yang akan bertarung pada pemilihan presiden periode selanjutnya.

2. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pola komunikasi politik secara tidak langsung (*indirect komunkation*). Selain itu manfaat teoritis lainnya adalah untuk menambah khazanah referensi mengenai ilmu pengetahuan politik dari sisi komunikasi politik, maupun opini publik.

Bagi peneliti, penelitian dan hasil penelitian dapat mempertajam penguasaan tentang penggunaan *framing* dan *priming* yang merupakan strategi politik untuk menggalang opini publik pada pemilihan presiden dan meningkatkan elektabilitas masyarakat yang dapat di implementasikan dalam pemilihan umum baik pemilihan presiden, gubernur, maupun bupati yang dilakukan pemilihan secara langsung.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan *framing* dan *priming*. Dari berbagai penelitian yang telah ada, Peneliti berhasil menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya :

Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Haidir Fitra Siagian yang berjudul *Pengaruh dan Efektivitas*

*Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik*²³ penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana media cara media sosial digunakan alat oleh komunikator politik untuk menggiring opini publik. Penggiringan opini publik harus dilakukan dengan teknik dan metode yang tepat sehingga dapat menghasilkan umpan balik dari khalayak terhadap berita yang dimuat.

Bagi para kompetitor politik yang bertarung pada pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, hingga pemilihan anggota legislatif, sangat penting sekali memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyamapaikan pesan-pesan politiknya secara efektif dan efisien. Melalui media sosial, substansi pesan-pesan politik lebih cepat dicerna oleh khalayak, sebab setiap saat khalayak dapat mengakses media sosial tanpa halangan dan batas geografis. Umpan baalik dari khalayak dapat merapatkan hubungan antara komunikator politik dan masyarakat.

Terlebih lagi dewasa ini, penggunaan media sosial di kalangan masyarakat semakin populer dan berkembang, hingga ke pelosok pedesaan. Sehingga dengan kemasn informasi yang baik, khalayak akan mudah memahami pesan-pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Pada akhirnya, peneliti tersebut dapat menyimpulkan bahwa melalui penyampaian pesan-pesan politik yang tepat dan dilakukan

²³ Haidir Fitra Siagian, "Pengaruh dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik dalam Membentuk Opini Publik", *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. 2, no. 1, Desember 2015

secara efektif akan mampu menarik simpati masyarakat sehingga mereka akan menerima maksud yang diinginkan oleh komunikator politik.

Penelitian kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Afindiary Novalinda Viani yang berjudul *Media Baru dan Partisipasi Politik (Pengaruh Twitter Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Remaja Dalam Pilkada Serentak 2015 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2014)*²⁴ penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh media *microblogingtwitter* terhadap tingkat partisipasi remaja dalam Pilkada Serentak 2015 dikalangan mahasiswa fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014.

Peneliti tersebut melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dan *survey* langsung terjun kelapangan, serta mengumpulkan data dengan kuisisioner pada sampel yang ditentukan yaitu 63 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear sederhana.

Dari hasil uji yang dilakukan peneliti tersebut, didapat nilai konstan dan regresi variabel tingkat partisipasi politik remaja sebesar 9,558. Sedangkan koefisien regresi dari variabel penggunaan media jejaring micro blogging twitter bernilai positif yaitu sebesar 0,518. Nilai t sebesar

²⁴ Avindiary Novalinda Viani. (2017). *Media Baru dan Partisipasi Politik (Pengaruh Twitter Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Remaja Dalam Pilkada Serentak 2015 pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2014)*, Skripsi Ilmu Komunikasi, Surakarta: Perpustakaan Fikom Universitas Surakarta, t.d

2,993 lebih besar dari nilai tabel sebesar 1,998. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa adanya besaran pengaruh yang signifikan antara variabel penggunaan media jejaring microblogging terhadap variabel tingkat partisipasi politik remaja sebesar 12,8% sedangkan 87,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian ketiga yang berhasil peneliti temukan yaitu penelitian dari Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi yang berjudul *Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor*²⁵. Yang membuat peneliti tersebut tertarik menelitinya adalah melihat realitas yang ada di Kabupaten Bogor bahwa para politisi di Kabupaten Bogor belum optimal memanfaatkan media sosial yang berbasis internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan media sosial dikalangan pelajar sebagai pemilih pemula, untuk mendeskripsikan penggunaan media sosial dikalangan politisi di Kabupaten Bogor, dan untuk mengetahui konten pesan kampanye politik para politisi di media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna media sosial semakin masif di kalangan pelajar sebagai pemilih pemula di kabupaten Bogor untuk mengakses informasi tentang pemilu, yaitu sebagai pengguna Twiteer 35%, Facebook 28%, dan Instagram 28%. Sedangkan dikalangan para politisi/partai politik dalam kampanye politik masih rendah dalam penggunaan akun media sosial (82,7%). Kemudian konten kampanye

²⁵ Ike Atikah Ratnamulyani dan Beddy Iriawan Maksudi, "Peran Media sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humanior*, vol. 20, no. 2, Juli 2018

politik para politisi dalam media sosial kurang menarik (94,2%). Adapun saran untuk para politisi antara lain: (1) Pemanfaatkan media sosial dalam kampanye pemilu secara optimal (2). Konten pesan politik sebaiknya disesuaikan dengan ciri khas pemilih pemula, seperti: sederhana, praktis, menarik dan mudah dipahami oleh mereka.

Penelitian yang keempat yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Ansor yang berjudul *Teori Agenda Setting dan Citra Pemerintah: Analisis Pemberitaan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintah SBY*.²⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pentingnya media dalam mempengaruhi ataupun menguatkan persepsi masyarakat terhadap pemerintahan pada era SBY. Menurut peneliti, bahwa apapun yang dianggap penting oleh media maka akan menjadi penting juga bagi publik.

Dalam konteks isu korupsi yang ada di Indonesia pada saat itu, peneliti tersebut menemukan bahwa korupsi sebagai *Priming* yang digunakan di dalam sebuah media. Semua itu dapat dilihat melalui penempatan berita ditajuk utama, panjang kolom, dan paragraf. Kemudian, sebagian besar yang disampaikan dalam sebuah pemberitaan dimuat dengan cara yang tidak menguntungkan bagi pemerintah yang mempengaruhi pendapat umum. Dengan demikian, citra pemerintah terus menurun, terutama dalam penegakan hukum dan penanganan kasus korupsi.

²⁶ Ansor, "Teori Agenda Setting dan Citra Pemerintah: Analisis Pemberitaan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintahan SBY", *Jurnal Komunikasi*, vol. 5, no. 2, April 2011, pp. 145-156

Penelitian kelima yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Rully yang berjudul *Efektivitas Iklan Negatif di Media Sosial dalam Politik di Indonesia*²⁷. Penelitian ini membahas tentang bagaimana media massa membentuk pandangan masyarakat terhadap politik pada pemilu pada tahun 2014 yang akhirnya terjadi fenomena dimana timbul komunitas pendukung. Jika dilihat lebih jauh, pola yang dimainkan dalam media massa tidak jauh beda pada iklan politik dengan memainkan masalah negatif di masyarakat. Menurut peneliti tersebut iklan politik yang memiliki negativitaslah yang mampu menjangka publik lebih dekat karena mudah bagi orang mempertimbangkan iklan negatif dibandingkan positif.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dimana peneliti tersebut mendapatkan hasil penelitian bahwa efek media sosial yang mempunyai kekuatan begitu besar sehingga terbentuklah partisipan, sukarelawan, atau pendukung pada pemilihan umum di 2014 serta selain dari itu efek-efek lain yang timbul dalam masyarakat begitu besar dan tidak bisa di alihkan sehingga terbentuk menjadi dua kelompok pandangan-pandangan yang besar.

Penelitian yang keenam yang berhasil peneliti temukan yaitu penelitian Andi Dwi Wahyu Batari yang berjudul *Kekuatan Politik Media Sosial dalam Kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala*

²⁷ Rully, "Efektivitas Iklan Negatif di Media Sosial dalam Politik di Indonesia", *Jurnal FISIP*, vol. 6, no. 1, Januari-Juni 2018, pp 69-79.

*Daerah Serentak Kabupaten Bulukumba Tahun 2015.*²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaruh penggunaan media sosial oleh A. M. Sukri A. Sappewali dan Tomy Satria Yulianto, S.Ip dalam pilkada serentak kabupaten bulukumba tahun 2015 yang mengiklankan profil dirinya dan menawarkan programnya agar mendapatkan elektabilitas dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data penelitian yang diperoleh oleh peneliti ini melalui wawancara kepada beberapa informan yang dianggap mampu menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaruh media sosial pada kemenangan A. M Sukri A. Sappewali dan Tomy Satria Yulianto S.Ip dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2015 cukup tinggi. Penggunaan media sosial dilakukan dalam hal pembentukan citra/pencitraan, serta sosialisasi dan koordinasi. Dari pemanfaatan tersebut, kecenderungan respon yang mereka terima dari netizen Bulukumba adalah positif. Ditandai dengan pemberian komentar yang sifatnya mendukung, juga respon berupa saran dan masukan diberikan sebagai sarana perbaikan untuk kepemimpinan mereka kedepan.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian *Framing* dan *Priming*

Konsep *framing* dan *priming* telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu politik untuk menggambarkan proses penseleksian dan

²⁸ Andi Dwi Wahyu Batari. (2017). *Kekuatan Politik Media Sosial dalam Kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bulukumba Tahun 2015*, Skripsi Ilmu Politik, Makassar: Perpustakaan Unhas, t.d

penyorotan aspek-aspek khusus pada sebuah berita oleh media. Dewasa ini, pemberitaan dalam sebuah media kerap kali digunakan sebagai alat politik oleh para elit politik khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti pada pemilihan umum. Ada beberapa definisi *framing* dalam Eriyanto. Definisi tersebut dapat di ringkas dan disampaikan oleh para ahli. Meskipun terdapat perbedaan pendapat namun definisi tersebut masih ada titik singgung utamanya, yaitu antara lain :

- a. Menurut Rlobert M. Entman. Proses seleksi realitas yang membuat realitas tertentu lebih menonjol dalam teks komunikasi dengan menekankan definisi dari sebuah masalah, penyebab masalah, membuat keputusan modal dan merekomendasikan penyelesaian tertentu.
- b. Menurut William A. Gamsom. Mengartikan *framing* sebagai suatu cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dengan menghadirkan konstruksi peristiwa yang berkaitan dengan objek. Kemasan (*package*) dari suatu peristiwa adalah rangkaian ide – ide yang menunjukkan isu apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan.²⁹

Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhirnya ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan menjadi isu yang dipilih sebagai isu utama (*priming*) dan bagian-bagian lainnya disamarkan atau bahkan dihilangkan. Artinya, peristiwa yang muncul dalam

²⁹Eriyanto, *Op.cit.*, hlm. 73

sebuah media baik media massa maupun media sosial semuanya di *design* dengan menggunakan pembingkaiian cerita atau isu yang menarik yang dapat mengarahkan opini publik. *Framing* adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Ditambah pula dengan berbagai kepentingan, maka kontstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut.³⁰

Framing memiliki enam prinsip penting diantaranya adalah: (1) pengorganisasian pesan (*organizing*). Frame berkaitan dengan bagaimana pesan diorganisasikan secara kognitif dan kultural sehingga pesan tersebut bisa dikenali oleh khalayak. Secara kognitif, memory manusia terbatas karena itu pesan diorganisasikan agar mudah diingat. (2) memenuhi aturan-aturan tertentu (*Principles*). Peristiwa yang kompleks disederhanakan melalui aturan kompleks tertentu agar mudah dikenali. (3) menyerap nilai dalam masyarakat (*shared*). Hal ini ditujukan karena *Framing* tidak hanya melibatkan kognisi secara personal tetapi juga sosial. (4) relatif konstan (*persistent*). (5) simbolik (*symbolically*) yang terdapat pada penggunaan kata dan kalimat. (6) struktur (*structure*). Masing-masing simbol keterkaitan satu sama lain, membentuk pengertian dan koheren.³¹

³⁰ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 167

³¹Eriyanto, *Op.cit.*, hlm. 75

2. Teori *framing* dan *priming*

Teori *framing* merupakan alat yang paling ampuh digunakan dalam penggunaan media massa seperti surat kabar, media sosial, televisi, dan radio. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan *framing* dan *priming* pada saat ini banyak digunakan dalam masa pemilihan umum yang mempunyai ruang lingkup yang luas seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan anggota legislatif tingkat nasional.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model *framing* dan *priming* yang digagas oleh Robert D Benford dan David A Snow dalam hasil penelitiannya yang dibuat dalam bentuk jurnal yang berjudul *Framing Processes and Sosial Movements: An Overview and Assesment*.³² Model *Framing* dan *priming* yang di konsep oleh Benford dan Snow merupakan sebuah tinjauan dan penilaian terhadap konsep *framing* yang kurang relevan tanpa meninjau aspek dampak yang timbul terhadap publik yang dapat menimbulkan gerakan sosial.

Teori *Framing* model ini akan menggambarkan bagaimana sistem proses pembentukan bingkai terhadap media yang lebih difokuskan terhadap salah satu isu yang muncul karena kehendak pencipta dan bertujuan akan mendapatkan dampak sosial yang timbul sesuai dengann keinginan para pencipta *frame*. Tugas utama *framing* adalah sebagai langkah utama yang menegosiasikan pemahaman bersama

³² Robert D. Benford dan David A. Snow, "Framing Processes and Sosial Movements: An Overview and Assesment", *Annual Reviews of sociology*, vol. 26, 2000, pp 611-639.

tentang beberapa kondisi permasalahan atau situasi yang didefinisikan sebagai kebutuhan perubahan, membuat atribusi tentang siapa saja atau apa saja yang harus dibenarkan atau disalahkan.³³

Dalam politik, *Framing* dapat memfasilitasi tindakan kolektif sebagai peluang politik.³⁴ Peluang politik yang dimaksudkan adalah dalam proses politik model ini dapat dimanfaatkan sebagai alat yang paling signifikan dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk memunculkan gerakan sosial terhadap efek model tersebut. Gerakan sosial akan muncul dalam rangka memajukan kepentingan pencipta *Frame* yang dikonseptualkan sebagai hasil. Selain itu, efek yang dimunculkan terhadap publik sebagai target utama akan menjadi peranan yang sangat penting dalam bentuk mobilisasi utama.

Selain itu, *Framing* dapat lebih efektif jika berkolaborasi dengan survey politik karena survey politik atau dalam istilah lain pendapat umum merupakan bagian yang paling terpenting dalam sebuah pembingkaihan sebuah peristiwa dalam proses pemilihan umum. Tujuan survey politik atau pendapat umum adalah untuk mendapatkan jawaban yang seragam dari sejumlah orang yang dipilih (*sample*) yang menurut kriteria dianggap relevan, mewakili seluruh kelompok orang yang kemudian informasi tentang mereka diperlukan seseorang.³⁵

Kemudian, keterkaitan besar yang dihasilkan antara survei politik, *framing* dan *priming* adalah opini publik yang melihat sebuah

³³ *Ibid.*, hlm. 615

³⁴ *Ibid.*, 631

³⁵ Bernard Hennesy, *Pendapat Umum*, terj. Amiruddin Nasution, Jakarta : Erlangga, hlm 49

peristiwa yang dibentuk dan menghasilkan responsibilitas terhadap sebuah peristiwa tersebut. Selain dari pada itu, opini publik akan memiliki dampak lagi yang kemudian muncul sebuah gerakan sosial yang dibentuk atas dasar persamaan pendapat dan menjadi gerakan yang tentunya akan secara sistematis.

Dari penjelasan diatas, peneliti sangat menggunakan teori model Benford dan Snow dikarenakan studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini sangat mendukung untuk menjadikan teori ini sebagai rujukan utama. Teori ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti.

Teori tersebut akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas peneliti nantinya. Ada beberapa urgensi penting yang menjadi alasan penting terkait penggunaan teori yang akan menjadi pedoman utama peneliti. Pertama, peneliti akan memberikan analisa pembahasan permasalahan yang diangkat dengan memberikan batasan-batasan masalah yang telah di sesuaikan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Kedua, peneliti akan mengelompokkan pembahasan-pembahasan yang akan diurutkan berdasarkan urutan permasalahan yang tujuannya adalah agar pembaca dapat lebih mudah memahami karya ilmiah ini. Dan yang ketiga, peneliti akan menggambarkan sebuah proses yang dibentuk secara sederhana dan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti agar dapat diterima oleh pembaca di seluruh kalangan lapisan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan guna memperoleh jawaban dari masalah yang dihadapi. Dengan kata lain merupakan suatu strategi yang harus dilakukan oleh peneliti dengan melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian dengan tujuan untuk memecahkan masalah³⁶.

Secara umum metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga metode yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, metode campuran. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan pembahasannya lebih bersifat kualitatif.

Untuk itu dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan penggunaan metode kualitatif maupun komponen-komponen dalam metode penelitian kualitatif seperti, lokasi atau tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data dan teknik pengujian kredibilitas atau keabsahan data.

1. Jenis Penelitian

Untuk dapat melihat bagaimana penggunaan hasil survei politik sebagai alat *framing* dan *priming* dalam memenangkan pasangan calon

³⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011. hlm. 8

presiden Jokowi – Ma’ruf dalam pemilihan presiden 2019. Sesuai dengan unsur – unsur pokok dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Ada beberapa definisi menurut para ahli dalam Andi Prastowo adalah sebagai berikut :

- a. Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
- b. Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.
- c. David william, menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang-orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.³⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif tidak membutuhkan hipotesis dalam sebuah penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan pencarian fakta dan dengan interprestasi yang tepat.

³⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, Hlm. 23

2. Sumber Data

Dalam pengambilan sumber data yang akan dijadikan sumber informasi, maka peneliti menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*) yakni suatu cara untuk menentukan sumber data dengan suatu pertimbangan tertentu, dengan metoda penarikan bola salju (*snowball*), yakni penentuan sumber data informasi yang pada awalnya jumlah kecil lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber informasi yang sedikit, belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari data lain yang dapat digunakan sebagai sumber informasi atau data, sampai data sudah jenuh, sehingga data sudah mencukupi. Dengan demikian jumlah sumber data akan semakin banyak, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.

Sumber data yang akan digunakan peneliti sebagai informasi utama dalam penelitian ini harus sesuai dengan ciri khas analisis isi sebagaimana yang di jelaskan oleh Andi Prastowo³⁸ yang mengutip pendapat Krippendorff adalah sebagai berikut:

1. Analisis isi adalah metode yang tidak terkontaminasi oleh prosedur pengumpulan data atau *unobstrusive*.
2. Analisis isi menggunakan data yang tidak terstruktur.
3. Analisis isi sensitif terhadap konteks. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan untuk memproses bentuk-bentuk simbolik.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 192

Fenomena dalam simbolik asli pun dapat dipahami. Dengan cara ini peneliti tidak dapat mengabaikan konteks (waktu, tempat, dan situasi berlakunya peristiwa). Dari teori-teori yang valid, konstruk analitis, atau pengalaman mengenai konteks peneliti, atau dapat membuat inferensi tanpa disadari oleh objek penelitian.

4. Analisis isi dapat diaplikasikan pada data yang cukup banyak jumlahnya.

Dengan mengacu pada pendapat diatas, maka yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini yakni hasil-hasil survey politik yang diposting menjadi berita pada media-media online.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Maka, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaang disebut dengan metode kepustakaan (*literer*) yaitu suatu jenis metode penelitian kualitatif yang tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya.³⁹

Hal ini dilakukan dengan melihat masalah yang diangkat oleh peneliti terdapat pada teks berita-berita dimedia mainstream atau berita digital. Dengan demikian, konteks pembahasan yang akan dituliskan dalam penelitian nanti tidak menjadi ambigu dan rancu. Berbagai jenis informasi data akan didapatkan melalui dokumen-

³⁹ *Ibid.*, hlm. 190

dokumen berupa kliping atau artikel yang muncul dari media massa yang kemudian dikumpulkan oleh peneliti dan di filter berdasarkan rujukan sumber yang terdapat pada lembaga-lembaga survei.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat berdasarkan hasil dokumentasi dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dengan mengorganisasikan data dengan metode penyeleksian data yang berdasarkan kelompok-kelompoknya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola dengan memisahkan mana saja yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis dekriptif kualitatif, yang mengacu terhadap konsep yang telah dibuat oleh Creswell⁴⁰ dalam Jonathan Sarwono mengatakan bahwa analisis kualitatif merupakan: a) proses yang berjalan secara terus-menerus melibatkan refleksi yang berkesinambungan mengenai data, mengajukan pertanyaan yang analitis, dan menulis memo selama riset dijalankan; b) melibatkan data yang bersifat tertutup dan terbuka, yang menghendaki pertanyaan umum, serta mengembabngkan analisis yang berasal dari informasi

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Strategi Melakukan Riset*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2013, Hlm. 194

yang disediakan oleh partisipan riset. Kemudian, harus mampu menganalisis data dari pendekatan yang bersifat umum menjadi pendekatan yang khas atau spesifik dalam riset kualitatif.

Dalam melakukan metode analisis, menurut J. R. Raco tantangan dalam analisis kualitatif adalah bagaimana mengartikan data yang banyak.⁴¹ Kemudian, pada tahap ini data akan dianalisis dengan cara sebagai berikut. Pertama, membaca berkali-kali data yang diperoleh sambil mengurangi tumpang tindih atau berulang-ulang. Kedua, melihat signifikansi atau pentingnya data yang diperoleh, berikan alasan-alasan yang krusial terhadap data yang didapatkan. Ketiga, mengklasifikasi atau mengkode data yang memiliki kemiripan atau kecocokan dengan data lain.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam sebuah penelitian tentu adanya tahapan-tahapan atau sistematika yang dijadikan panduan dalam penelitian sistematika laporan yang akan peneliti buat terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang dirangkum dalam 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, termasuk pula menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teoritik sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan tipe penelitian, pendekatan, data dan

⁴¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (jenis, karakteristik, dan keunggulannya)*, Jakarta : PT. Grasindo, 2010, hlm. 123

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian yang akan diteliti.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bagian bab kedua ini peneliti akan menjelaskan bagaimana keadaan secara rinci mengenai lokasi penelitian, dan akan menjelaskan secara detail gambaran wilayah tersebut

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, hasil data- data yang sudah didapatkan akan dikaitkan dengan temuan di lapangan dan pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab awal, kemudian data yang diperoleh peneliti akan di bahas bagaimana keterkaitannya dengan teori yang sudah ada serta menjelaskan hasil temuan berdasarkan sudut pandang subjek dengan sudut pandang teoritis

BAB IV PENUTUP

Pada akhir bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian pada bagian saran peneliti memberikan rekomendasi- rekomendasi yang biasa di lakukan oleh pihak yang terlibat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian yang berjudul Hasil Survey Politik Sebagai Alat Kemenangan Kemenangan Pasangan Calon Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin Pada Pemilihan Presiden 2019, yang terfokus pada Pemilihan Umum Presiden 2019 dan Hasil-Hasil Survey serta Media-Media yang aktif memberitakan tentang Hasil Survey Politik.

A. Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia sudah berlangsung sejak 10 tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat perubahan-perubahan dalam setiap periode pemilihannya baik dari segi pemilihan, kampanye, serta jabatan apa saja yang diberlakukan sistem pemilihan umum. Secara konseptual, pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka dalam pemilihan umum perlu dilaksanakan pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak di mata hukum.⁴²

Pemilihan umum juga dapat didefinisikan sebagai suatu sarana dalam membentuk cita-cita masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Dengan pemilu, kekuasaan yang awalnya tidak menjadi keinginan masyarakat banyak menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Menurut Umarudin Basdar, Pemilihan Umum secara operasional dapat

⁴² Muhadam Labolo & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2017 hlm. 50

diartikan dari sudut pandang teknis pelaksanaannya. Menurutnya, pemilu merupakan pemberian hak suara kepada rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk menentukan pilihan terhadap wakil-wakil rakyat yang menjadi peserta pemilu.⁴³

Secara sederhana pendefinisian pemilihan umum ini adalah sebagai jalan strategis yang disepakati bersama-sama rakyat melalui wakilnya diparlemen dengan memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri melalui wakil-wakil rakyat baik yang ada dilembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang kemudian aturan-aturan main yang di bentuk dalam pemilihan umum tentunya akan dikaji bersama serta disepakati bersama-sama demi terciptanya pemilihan umum yang jujur dan adil.

Dalam pemilihan umum terdapat 4 (empat) sistem pemilihan umum yang terbentuk berdasarkan kondisi geografis, jumlah penduduk serta kesepakatan antar wakil rakyat yang digunakan di indonesia, antara lain:⁴⁴

1. Sistem Distrik

Sistem pemilihan ini terbentuk berdasarkan kondisi dan letak geografis dimana wilayah negara dibagi menjadi daerah-daerah pemilihan (distrik). Dalam sistem pemilihan distrik banyak nya daerah pemilihan berdasarkan kursi yang diperebutkan. Selain dari itu dalam sistem distrik, suara yang terbanyak atau suara mayoritas akan

⁴³ *Ibid*, hlm. 5

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 61

langsung menjadi pemenang tunggal dan untuk suara yang kalah maka tidak akan mendapatkan kursi dan tidak diperhitungkan lagi suaranya.

Biasanya, orang yang dapat memenaangkan kontestasi pemilihan umum dalam sistem ini adalah orang yang mempunyai pengaruh besar dalam setiap wilaayahnya baik mempunyai pengaruh melalui faktor keturunan, faktor suku, ras maupun golongan. Dengan kata lain, jika diindonesia masyarakatnya masih menganut paham yang mempunyai persatuan suku yang begitu besar atau menganut paham politik identitas, maka yang mempunyai power tersebutlah yang nantinya dapat memenangkan pemilihan umum dalam sistem ini.

2. Sistem Proporsional.

Sistem proporsional merupakan kebalikan dari sistem pemilihan umum distrik, dimana proporsi suara akan sebanding proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam pemilihan umum. Dalam sistem pemilihan umum ini suara yang telah didapatkan tidak akan banyak terbuang sia-sia. Sistem pemilihan ini sangat cocok digunakan dinegara yang majemuk karena bukan hanya suara tertinggi saja yang akan dipilih, melainkan suara tertinggi pertama, kedua dan seterusnya hingga pembagian suara terakhir yang tidak akan bisa dibagi kembali.

Selain dari itu, partai yang memiliki basis masa yang sedikit atau partai minoritas mempunyai peluang untuk mendapatkan kursi di dalam perlemen. Disamping itu, sisten pemilihan proporsional memiliki kelemahan dibandingkan sistem distrik dimana rumus

pembagian kursi yang begitu rumit yang jika tidak dipahami dengan benar akan menimbulkan persepsi yang kurang positif.

3. Sistem Campuran.

Sistem pemilihan ini dapat dikenal dengan sistem pemilihan umum semi proporsional karena dalam sistem pemilihan umum campuran ini sistem suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara sistem proporsional dan sistem popularitas-mayoritas atau distrik. Sistem ini merupakan penggabungan dua sistem antara proporsional dan sistem distrik yang diambil dari segi positif.

Sistem ini memiliki suatu sistem yang disebut dengan sistem paralel,⁴⁵ dalam sistem ini menjalankan dua sistem yang dimana surat suara yang akan dicoblos terdapat dua versi antara proporsional dan distrik digabung menjadi satu waktu pemilihan. Maksudnya adalah dimana daerah yang menggunakan sistem distrik tidak dapat dikompensasikan kepada daerah yang menggunakan sistem proporsional. Sistem ini dijalankan dengan tujuan agar semua wilayah baik distrik maupun proporsional akan dijalankan satu waktu namun tidak mengubah esensi dasar disebuah wilayah dalam sistem pemilihan umum.

4. Sistem di luar *Mainstream*.

Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang berlaku dengan metode diluar di antara ketiganya namun unsur-unsur diantara

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 79

ketiganya digabungkan menjadi satu. Varian-varian dari sistem ini antara lain : 1) *Non Tranferable Vote* (SNTV), 2) *Limited Vote* (LV), 3) *Bourda Count* (BC).

Sistem pemilihan umum SNTV menggunakan sistem distrik namun dalam sistem ini tidak hanya merebutkan satu kursi saja melainkan ada sejumlah kursi yang telah ditentukan. Pemilih hanya memberikan suara satu kali. Apa bila kursi yang di perbeutkan terdapat 4 kursi maka peraih suara terbanyak pertama hingga keempat mendapatkan kursi yang telah disediakan. Diindonesia sistem ini berlaku untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian, sistem LV hampir sama dengan sistem SNTV dimana menggunakan sistem distrik yang memperebutkan banyak kursi. Namun yang membedakan dalam sistem LV adalah pemilih memberikan suara lebih dari satu kali. Selanjutnya, sistem BC dimana sistem ini menggunakan penyeleksian kandidt yang dilakukan pemilih yang sistem nya hampir sama dengan *Alternative Vote* (AV). Perbedaannya terletak pada setiap preferensi yang memiliki nilai yang berbeda.

B. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Reformasi

Indonesia merupakan negara yang begitu luas yang mempunyai banyak pulau, bahasa, agama dan ras. Dalam menyatukan keberagaman yang begitu kompleks, indonesia memiliki cara memilih pemimpinnya

dengan sistem demokrasi yang dalam salah satu praktek demokrasi yang secara nyata adalah pemilihan umum.

Pemilihan Umum terbagi menjadi 5 (empat) Jenis yang di pilih oleh rakyat diantaranya adalah: a)Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), b)Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terbagi menjadi dua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, c)Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), d)Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dengan tujuan agar terpilihnya Bupati, Walikota dan Gubernur, serta e) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

1. Pemilihan Umum 1999

Pemilihan Presiden awal runtuhnya masa orde baru tidak dipilih secara langsung oleh rakyat indonesia. melainkan berdasarkan hasil musyawarah yang diadakan oleh Dewaan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1998 Presiden Soeharto di turunkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan gerakan people power dengan argumen kuat masyarakat yang menilai hasil pemilu pada tahun 1997 sudah tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat indonesia.

Setelah runtuhnya masa jabatan Soeharto pada tahun 1998 yang menggantikan jabatan Soeharto sebagai Presiden adalah Habibie atas desakan Publik. Pada tahun 1999 dilakukan pemilihan umum yang telah dirombak habis-habisan sistem pemerintahan oleh permintaan masyarakat indonesia. Namun, pemilihan umum yang dilaksanakan

pada tahun 1999 bukanlah pemilihan presiden, melainkan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada tahun 1999 pemilihan umum di Indonesia mempunyai 3 (tiga) landasan hukum diantaranya adalah; Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pada pemilu masa reformasi saat itu terdapat 141 partai politik yang mencalonkan diri untuk menjadi peserta pemilu namun yang terpilih hanya terdapat 48 partai politik.⁴⁶

2. Pemilihan Umum 2004

Pada tahun 2004 pemilihan umum bukan hanya memilih partai politik dan DPR saja melainkan ada pemilihan presiden yang pada saat itu pertama kali pemilihan presiden dilakukan secara langsung. landasan hukum pelaksanaan pemilu tahun 2004 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden.

Dalam pemilihan umum tahun 2004, tiga partai besar yang pada tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pemain utama akan lebih

⁴⁶*ibid*, hlm. 143

memperketat peraturan-peraturannya dalam segi persyaratan bagi partisipasi partai pada pemilu 2004. Pada periode sebelumnya yang pada saat itu sudah banyak sekali bermunculan partai-partai baru. Namun, dalam menyikapi hal ini partai-partai besar yang telah menduduki peringkat teratas dalam setiap pemilu periode sebelumnya memmpkuat isunya bahwa partai-partai daerah dilarang untuk mengikuti kontestasi politik baik dari segi daftar terbuka maupun tertutup.⁴⁷

Dari segi Pemilihan Presiden, pemilu tahun 2004 ini adalah sebuah awal Pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung. sistem pemilihan yang digunakan adalah maayoritas mutlak dua putaran, dengan tujuan agar kandidat mendapatkan suara yang memadai dengan kondisi indonesia yang amat beragam. Dalam Pemilihan Presiden pertama ditahun 2004, lima pasangan calon bertarung diputaran pertama pada bulan juli, semua kandidat tidak ada yang mendapatkan suara sebesar 35%. Namun, pada putaran kedua Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan suara terbanyak dengan total suara sebesar 61% .⁴⁸

3. Pemilihan Umum 2009

Pemilihan umum 2009 merupakan pemilu periode kedua yang mana dalam pemilihan ini diikuti langsung oleh pemilihan presiden.

Dasar hukum pada pemilihan umum tahun 2009 adalah UU No. 22

⁴⁷ Andrew Ellis dkk, *Desain Sistem Pemilu: Buku Pnduan Baru International IDEA*, terj. Noor Choliz Swedia : Stockholm, Hlm. 80

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 81

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pemilihan umum tahun 2009 ini sistem yang digunakan adalah *Two Round System* yang dimana sisten ini adalah varian dari sistem distrik. Jika peserta tidak mencapai suara minimal 50%+1 maka akan dilakukan pemilihan ulang yakni suara terbanyak pertama dan kedua. Namun, dalam satu putaran saja pasangan SBY-Boediono memperoleh suara 60,80% maka otomatis pemilihan kedua tidak dilakukan dan langsung dinyatakan bahwa pemenangnya adalah SBY-Boediono.

4. Pemilihan Umum 2014

Dalam pemilihan umum tahun 2014 menjadi pemilihan yang terbaru lagi dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya, salah satunya adalah sistem keterbukaan data pemilu dimulai dari data pemilih hingga data calon kandidat baik kandidat calon legislatif maupun calon eksekutif. Semua itu telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh KPU. Dengan demikian, UU KIP akan menjadi arus utama dalam segi informasi politik diindonesia.

Dari pemilihan umum baik pemilihan presiden maupun pemilihan DPR, DPD, dan Pemilihan Kepala Daerah. Pertama kalinya ada sistem

keterbukaan informasi data yang dapat diakses online melalui situs *www.kpu.go.id*, maupun berbagai URL dan *link* khusus yang di buat KPU untuk memuat data-data tertentu.⁴⁹

Dari segi peraturan perundang-undangan pemilihan umum pada tahun 2014 masih memberlakukan Undang-Undang yang dibuat untuk pemilu 2009 yakni UU Tahun 2008. Sistem pemilu yang dilakukan pada tahun 2014 ini dilakukan hanya pada putaran pertama saja. Dengan hasil akhir yang didapat adalah Jokowi-JK terpilih menjadi presiden dengan perolehan suara sebanyak 53,15%.

5. Pemilihan Umum 2019.

Pemilihan umum pada tahun 2019 merupakan pemilihan umum pertama kali sepanjang sejarah di Indonesia yang melakukan pemilihan umum secara langsung dan serentak dengan jumlah surat suara 5 surat suara yang dimana masing-masing memberikan 5 suara dengan masing-masing satu suara disetiap surat suara yang berbeda. Surat suara yang ada pada pemilu 2019 adalah surat suara untuk Pemilihan Presiden, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota, dan DPD-RI. Pemilu serentak tersebut bermula pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pelaksanaan Pemilu Serentak.⁵⁰

⁴⁹ Harun Husein, *API PEMILU: Menuju Smart Election*, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2015 hlm. 4

⁵⁰ Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 81

Dalam pemilu serentak yang dilakukan sekaligus 5 surat suara ini akan membuat pemilih kesulitan mendapatkan informasi yang sangat banyak dari berbagai kandidat yang terdapat dimasing-masing surat suara. Dengan demikian, pemilih lebih cenderung terhadap isu-isu Nasional, ini akan memberikan dampak terhadap kandidat yang harus lebih aktif untuk meningkatkan elektabilitas dirinya sendiri dengan melakukan marketing politik terhadap dirinya sendiri karena dengan adanya pemilihan umum yang dilakukan secara serentak ini membuat partai politik tidak akan bisa fokus pada salah satu porsi didalam pemilihan umum 2019.

C. Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pemilu

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, yang di kontestasikan dalam pemilihan umum antara lain adalah pemilihan presiden beserta wakil presiden, pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD, dan untuk pemilihan umum kepala daerah beserta wakil kepala daerah.

Dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggaraan pemilu, KPU di tuntutan independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2007

tentang penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara keberadaan pemilu terdapat dalam pasal 22-E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Tanggung jawab KPU secara “yuridis formal” adalah dalam hal penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar. Tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Adapun tujuan nasional Indonesia adalah masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Hal ini disebabkan karena pemilu adalah titik awal dan kunci strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar pro rakyat sebagai pemimpin bangsa dan negara. Keberhasilan KPU dalam melaksanakan asas pemilu “Luber Jurdil” (Langsung, Umum, Bebas,

Rahasia, Jujur, Adil) akan ikut mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, ada sebuah lembaga yang selalu memantau pergerakan pemilu dan memberikan sanksi tindakan tegas jika pemilihan umum tidak berjalan sesuai dengan prosedural, lembaga tersebut disebut dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Lembaga pengawas pemilu baru diberlakukan secara sah melalui peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berisi tentang pengawasan pemilu yang harus terpisah dari struktur Komisi Pemilihan Umum dan kemudian dikuatkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan membentuk lembaga tetap yang diberi nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kemudian, pergerakan kelembagaan pemilu tidak cukup sampai disitu saja. Dengan muncul kembali peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Maka, secara kelembagaan pengawas pemilu dibentuklah lembaga bawaaslu ditingkat provinsi hingga ke tingkat kabupaten. Selanjutnya, Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bab 2 Pasal 89 ayat 2 bahwa bawaslu memiliki tingkatan dari mulai Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS serta dilanjutkan pada pasal 3 menyatakan bahwa Lembaga-Lembaga tersebut bersifat khusus dan istimewa.

Peranan bawaslu dilihat secara kelembagaan dan aspek keadilan pemilihan umum, bawaslu harus berdiri diantara Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara; Kandidat yang akan berkonstasi dalam pesta demokrasi baik kandidat Calon Eksekutif maupun Calon Anggota Legislatif. Karena, jika terjadi pelanggaran pemilu yang tidak sportif sesuai dengan ketentuan aturan main yang telah disepakati, maka bawalu berhak melakukan penindakan pelanggaran pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat 1, 2, dan 3.⁵¹

D. Lembaga-Lembaga Survei di Pemilihan Umum 2019

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Pesta terbesar yang terjadi dari sebuah proses demokrasi adalah pemilihan umum. Penting untuk dipahami bahwa pemilihan umum adalah jantungnya negara demokrasi karena dengan adanya pemilihan umumlah mekanisme-mekanisme yang terjadi didalam negara demokrasi akan berjalan sesuai dengan substansinya sebagai negara penganut demokrasi.

⁵¹ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2017. Undang-Undang tersebut mengatur tentang bagaimana Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya serta mengatur juga tentang bagaimana Bawaslu melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya yang dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang tersebut.

Di setiap pemilihan umum, seluruh masyarakat sudah pasti tentu akan terlibat aktif dalam menyukseskan pemilu tersebut. Baik masyarakat golongan menengah kebawah hingga masyarakat golongan menengah keatas. Dilain sudut pandang, lembaga-lembaga swadaya, organisasi masyarakat, hingga lembaga survei sudah pasti tentu akan ikut berperan aktif dalam sebuah pemilihan umum.

Lembaga survei atau sering juga disebut jajak pendapat sangat penting ikut serta dalam pemilihan umum. Hal ini di dasari oleh banyaknya hak pilih yang harus diketahui tanggapannya terhadap calon pemimpin kedepan atau bahkan penilaian pemimpin negara atau daerah yang telah lalu dalam hal positif yang membangun tentunya untuk kepentingan negara bersama.

Lembaga survei harus berada diantara masyarakat dan elit politik karena demi menjaga kredibilitas lembaga survei itu sendiri khususnya dan demi terciptanya hasil yang mengarahkan terhadap kemajuan negara untuk kepentingan masyarakat bersama pada umumnya. Dalam setiap pemilihan umum, lembaga survei itu sendiri telah mempunyai standarisasi sendiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai jajak pendapat dan perlu mendapat persetujuan secara legalitas dari penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Komisi pemilihan Umum. Berikut ini beberapa lembaga survei yang telah mendapatkan legalitas atau diakui oleh KPU antara lain : ⁵²

⁵²Data KPU, www.kpu.go.id, diakses pada 4 september 2019 pukul 06.00 wib

Tabel 2.1 Daftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Hitung Cepat

Pemilu 2019

No.	Nama Lembaga	Pimpinan	Alamat	Keterangan
1	Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)	Vivi Sumanti	Gedung Graha Aziz Lantai 4 Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 12 A RT/RW. 012/009, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Oktober 2018
2	Poltracking Indonesia	Hanta Yuda	Gedung Graha Aziz Lantai 4 Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 12 A RT/RW. 012/009, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Oktober 2018
3	Indonesian Research And Survey (IRES)	Indrayadi, M.Si	GRIYA DHARMAPENA JL. Kedondong No. 161, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Oktober 2018
4	Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia	Dr. Drs. Eddy Sukmana, SH, MM, MH	Jl. Radio Dalam Raya No. 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140	Sertifikat Terdaftar Tanggal 22 Januari 2019
5	Charta Politika Indonesia	Yunarto Wijaya	Jl. Cisanggiri III No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta	Sertifikat Terdaftar Tanggal 22 Januari 2019
6	Indo Berometer	Muhammad Qodari	Jl. Tebet Barat Dalam IV No. 13, Tebet, Jakarta	Sertifikat Terdaftar Tanggal 22

			12810	Januari 2019
7	Penelitian dan Pengembangan Kompas	Budiman Tunaredjo	Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta Pusat 10270	Sertifikat Terdaftar Tanggal 24 Januari 2019
8	Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)	Djayadi Hanan	Jl. Kusumaadmaja No. 59 Menteng, Jakarta Pusat 10350	Sertifikat Terdaftar Tanggal 24 Januari 2019
9	Indikator Politik Indonesia	Berhanuddin Muhtadi, Ph.D	Jl. Cikini V No. 15A Menteng, Jakarta Pusat 103310	Sertifikat Terdaftar Tanggal 12 Februari 2019
10	Indekstat Konsultan Indonesia	Ary Santoso, S.tat, M.Si	Greenhouse, Multivision Tower 25th Floor. Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta Selatan 12980	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Februari 2019
11	Jaringan Suara Indonesia	Fajar S. Tamin	Jl. Pasar Minggu Raya I B RT 04/04 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Februari 2019
12	Populi Center	Hikmat Budiman	Jl. Letjen S Parman Kav 5-6 Kompleks Mandiri Blok O No. 12 Slipi, Jakarta Barat 11480	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Februari 2019
13	Lingkaran Survey Kebijakan Publik	Sunarto	Gd. Graha Dua Rajawali Jl. Pemuda No. 70 Rawamangun Jakarta Timur 13220	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
14	Citra Publik Indonesia	Hanggoro Doso Pamungkas	Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019

15	Survey Strategi Indonesia	Ardian Sopa	Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
16	Jaringan Isu Publik	Ari Nugroho	Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
17	Lingkaran Survey Indonesia	Agustinus Budi Prasetyohadi	Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
18	Citra Komunikasi LSI	Toto Izulfatar	Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
19	Konsultan Citra Indonesia	Muchajjir Aslamy Muhammad	Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
20	Citra Publik	Ade Mulyana	Jl. Pemuda No. 70, Rawamangun, Jakarta Timur 13220	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
21	Cyrus Network	Fadli MR	The Promenade Building, Jl. Warung Jati Raya No. 98 Lot 12 Pejaten Barat, Jakarta Selatan, 12510	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
22	Rakata Institute	Dr. Eko Kuswanto	Jalan Nusa Indah II No. 16 Rt. 026/LK. II Kel. Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35214	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
23	Lembaga Survei Kuadran	Didi Wahyudi	Jl. Veteran 1 Gg. Walet No. 11 Kel. Korpri Raya Sukarame Bandar Lampung	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
24	Media Survei Nasional	Rico Marbun,	Graha Mustika Ratu, Suite 707 Jl. Gatot Subroto Kav.	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8

		M.Sc	74-75, Jakarta 12870	Maret 2019
25	Indodata	Danis Tri Saputra Wahidin, S.IP, M.IP	Jl. Terusan Buah Batu No. 170 RT. 02 RW 01 Kujangsari Cijawura Bandung Jawa Barat, Perum Permata Permai Blok C No. 9, Pancoran Mas Depok	Sertifikat Terdaftar Tanggal 8 Maret 2019
26	Celebes Research Center	Herman Heizer	Jl. Adhyaksa IV No. 9 Makassar Sulawesi Selatan	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
27	Roda Tiga Konsultan	Muhamad Kafi Siregar	Jl. Lebak Raya 1 No. 1H, Jakarta Selatan	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
28	Indomatrik	Febra Anugrah	Graha Pesanggrahan, Hl. Sabar Raya No. 41 Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
29	Puskaptis	Ir. Husin, M.Si	Graha Pesanggrahan, Hl. Sabar Raya No. 41 Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
30	Pusat Riset Indonesia (PRI)	Muzani	Jl. RP. Soeroso No. 33 Cikini Menteng, Jakarta Pusat	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
31	PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)	Kuskridho Ambardi, Ph.D	Jl. Cikini V No. 15A Menteng, Jakarta Pusat 103310	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
32	Centre for Strategic and International	Dr. Philips J Vermonte	Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta	Sertifikat Terdaftar

	Studies (CSIS)		Pusat 10160	Tanggal 18 Maret 2019
33	Voxpol Center Research & Consultan	Pangi Syarwi	Jl. Muhammad Kahfi 1, No. 8A, Jagakarsa, RT. 2/6 Kota Jakarta Selatan	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
34	FIXPOLL Media Polling Indonesia	Mohamad Anasra, M.Si	Graha Toedjoeh Empat, Jl. Wolter Monginsidi, Selong, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan 12180	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
35	Cirus Surveyors Group	Kadek Dwita Apriani	Jl. Rawajati Timur Raya Blok AM21 Rawajati Pancoran Jakarta Selatan 12750	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
36	Arus Survei Indonesia	Ali Rifan	Jl. Epicentrum Tengah No. 3 Karet Kuningan, Jakarta Selatan	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
37	Konsepindo Research and Consulting	Sapraji	Komplek Perkantoran Golden Road ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu Blok C 28/35, Tangsel 15322	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
38	PolMark Indonesia	Eko Bambang Subiantoro	Jl. Opal II blok L No 5 Permata Hijau Jakarta Selatan	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
39	PT. Parameter Konsultindo	Dr. Agus Wibowo, SE, MM, CIMP	Jl. Ampera VIII No. 17 Rt. 06/01 Kel. Pekiringan Kec. Kesambi Kota Cirebon	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019
40	Lembaga Real Count Nusantara	Marwan Hakim	Jl. Kenari Raya No. 4 BTN Sweta Indah Kota Mataram	Sertifikat Terdaftar Tanggal 18 Maret 2019

Sumber : www.kpu.go.id

E. Media-Media yang Aktif Memberitakan Hasil Survei

Media berita dewasa ini memiliki sorotan dimata publik karena selain dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat, media juga menjadi kepanjangan tangan masyarakat dalam melihat fenomena yang terjadi baik dilingkungan sekitar maupun dunia luar yang tidak dapat dijangkau masyarakat luas dengan mudah di berbagai wilayah. Dengan hadirnya media masyarakat dapat mudah melihat fenomena yang terjadi dengan kurun waktu yang tidak lama.

Namun dilain hal, media dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian berdasarkan efektifitasnya dan fungsinya. Antara lain: Media Cetak, Media Online, dan Televisi.

1. Koran atau Surat Kabar

Efektifitas Koran atau Surat Kabar dalam menjangkau audiensnya bisa dibilang berhasil karena dengan rutinitas percetakan yang dilakukan secara berkala, masyarakat dapat mengetahui berita-berita yang terjadi secara berkala namun tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Koran adalah media pemberi informasi terhadap masyarakat luas yang membutuhkan berita yang terjadi disekitarnya.

Pada zaman dahulu sebelum hadirnya media massa, masyarakat mendapatkan informasi melalui mulut kemulut. Namun, dalam setiap pesan yang diterima melalui mulut-kemulut tersebut biasanya terjadi *miss communication*. Namun, semenjak hadirnya media massa manusia lebih mudah menerima informasi yang tentunya berdasarkan fakta

yang ada karena dalam sebuah media massa yang dimuat oleh wartawan telah melalui proses verifikasi data yang diatur melalui kode etik jurnalis.

Pada saat pesta demokrasi diselenggarakan di Indonesia, koran juga dapat menjadi alat penyedia informasi terkait politik bagi calon pemilih yang sangat membutuhkan sekali berbagai informasi politik baik dari profil, elektabilitas, maupun popularitas para Kandidat yang bertarung pada kontestasi politik. Ada beberapa koran yang dirangkum oleh penulis mampu menarik minat masyarakat untuk menjadi pembaca setia diantaranya adalah :

a. Koran Sindo.

Surat kabar merupakan media terbaik dalam menjadikan referensi untuk melihat sebuah fenomena yang terjadi pada saat ini. Dalam setiap isu yang terjadi yang biasanya menjadi perbincangan yang sangat hangat biasanya berasal dari surat kabar atau koran.

Koran Sindo merupakan surat kabar di Indonesia yang pertama kali terbit pada tanggal 30 Juni 2005 di Jakarta. Dilahirkan oleh PT Media Nusantara Informasi (MNI), sub-sidiary dari PT. Media Nusantara Citra (MNC) yang menaungi RCTI, MNC TV, Global TV dan Trijaya Network. PT. MNC sudah mempunyai banyak pengalaman dalam mengelola media serta terbilang mapan dan berpengaruh di kalangan masyarakat.

b. Harian Kompas

Merupakan sebuah nama surat kabar yang memiliki kantor pusat di Jakarta. Koran Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara. Didalam koran ini berisi tentang berbagai informasi yang dibentuk oleh para wartawan Kompas untuk menarik minat baca masyarakat. Meskipun pada saat ini minat baca masyarakat Indonesia terhadap surat kabar dalam bentuk cetak menurun, namun Harian Kompas selalu memberikan desain terbaru untuk memberikan rangsangan terhadap masyarakat Indonesia untuk membacanya.

Didalam koran Harian Kompas terdapat berbagai informasi berita yang diangkat terkait isu dan permasalahan sosial yang hadir didalam masyarakat Indonesia baik berita tentang Politik, Ekonomi, dan Sosial kemasyarakatan yang dimana semua itu dapat menjadi salah satu bagian yang dapat menjadi referensi masyarakat untuk membentuk opini maupun membuat kebijakan.

c. Harian Republika

Koran Harian Republika Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai pelopor pembaruan media masa Indonesia. Sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media Harian Republika melahirkan keseimbangan baru dalam tata informasi.

Harian Republika mempunyai kantor utama di jl. Warung Buncit No. 37 Jakarta Selatan. Pemilik republika adalah Mahaka Media, yang diketuai oleh irfan junaidi sebagai pimpinan redaksi, Subroto kardjo di redaksi berita dan pemiliknya adalah Erick Tohir. Harian republika adalah salah satu surat kabar yang sudah sangat berpengalaman dan telah teruji kredibilitasnya sesuai ketentuan jurnalistik.

2. Media Online

Tingkat efektifitas media online jauh diatas media cetak karena dalam memberitakan isu-isu yang terjadi saat ini media onlie cenderung lebih singkat dibandingkan media cetak karena media online dapat dijangkau dengan mudah oleh audiens pada saat ini dengan bantuan smartphome yang mayoritas masyarakat sudah memilikinya.

Media online dewasa ini sudah banyak sekali bermunculan terlebih lagi media-media online yang menjadi titik fokus utamanya menjadi media yang khusus menyiarkan berita akktivitas sosial dan politik. Berikut ini beberapa situs berita media online yang teratas berdasarkan ratingnya, yaitu:

Tabel 2.2 Situs Berita Online Teratas di Indonesia

No	Situs	Waktu Harian di Situs (Menit:Detik)	Tampilan Halaman Harian per Pengunjung	Persentase Lalu Lintas Dari Pencarian	Total Situs yang Pentautan
1	Okezone.com	4:51	4,64	30,00%	16.535
2	Tribunnews.com	3:56	1,93	63,00%	37.012
3	Detik.com	9:20	4,88	22,00%	51.978
4	Sindonews.com	3:23	2,08	48,70%	4.963
5	Kompas.com	5:54	2,32	35,50%	40.872
6	Liputan6.com	4:39	2,15	48,50%	21.366
7	Idntimes.com	2:36	1,77	64,60%	4.569
8	Kumparan.com	2:17	1,54	49,70%	24.282
9	Suara.com	3:26	2,05	25,10%	3.312
10	Cnnindonesia.com	4:23	2,16	40,20%	5.999
11	Viva.co.id	3:12	1,97	20,80%	10.488
12	Merdeka.com	4:18	2,22	36,10%	11.049
13	Tempo.co	11:39	3,33	43,90%	11.149
14	Akurat.co	5:44	3,10	5,30%	1.180

Sumber : <https://www.alexa.com/topsites/countries/ID>⁵³

3. Televisi

a. Tv One

Pertama kali mengudara pada tanggal 14 februari 2008 pada pukul 19.30 WIB, diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono

⁵³ Alexa Rank adalah anak perusahaan dari Amazon yang merupakan situs dengan memiliki cara kerja melakukan pendataan terhadap situs-situs yang ditautkan kepada alexa dengan melakukan pengelompokan situs – situs teratas baik secara global maupun berdasarkan regional wilayah negara masing-masing situs tersebut berasal.

Presiden Republik Indonesia.⁵⁴ televisi yang bernama tv one ini mempunyai tag line pada saat baru pertama kali mengudara “Memang Beda” karena sajian informasi dan program yang diberikan agak berbeda dengan stasiun televisi lainnya.

Kemudian, program yang berbeda dimaksud adalah membentuk pengklasifikasian program-program dalam kategori *news, current affairs dan sports*. Selain itu juga ada beberapa program yang dibentuk semacam diskusi santai yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sesuai dengan isu dan dilarifikasi oleh pihak-pihak terkait secara langsung.

Tv One selalu membuat arah gerakan baru di bidang informasi agar menarik minat penonton. Selain itu, pada saat pilkada ataupun pemilihan umum tiba, televisi berita ini akan membuat program dengan menyediakan informasi yang membuat penonton tertarik. Isu-isu politik selalu hangat di televisi ini, dinamika negara sangat terasa dengan adanya program televisi yang dibentuk oleh TV One.

b. Kompas TV

Kompas TV merupakan televisi yang ada di Indonesia yang menjadi mediator masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia baik dari segi aspek politik, hukum, ekonomi maupun sosial.

⁵⁴ Lihat Profil TVOne, <https://tvonenews.tv/profil>, diakses pada tanggal 18 september 2019 pukul 19.30 wib.

Kompas TV dimiliki oleh Kompas Gramedia yang sebelumnya perusahaan tersebut pernah memiliki stasiun televisi yang bernama TV7. Namun, TV7 dibeli oleh pihak Trans Crop pada tahun 2006 yang kemudian berubah nama menjadi Trans7. Sebagai gantinya perusahaan Kompas Gramedia mendirikan stasiun televisi baru yakni Kompas TV.

Kompas TV mempunyai program unggulan yaitu Rumah Pemilu yang menjadi siaran utamanya pada pilpres 2019. Pada tanggal 19 oktober pun pernah *Launching* program Rumah Pilkada 2018. Sudah jelas bahwa Kompas TV menyatakan bahwa dirinya adalah stasiun televisi yang menjadi media informasi pemilu yang dimana programnya semua bersangkutan dengan pemilu, kandidat maupun partai politik. Slogan yang selalu dibentuk oleh tim redaksinya adalah “Independen dan Terpercaya”⁵⁵ dimana semua itu dibentuk sedemikian rupa agar membentuk citra Kompas TV sebagai televisi yang mendidik.

c. Metro TV

Di kelola oleh PT. Media Televisi Indonesia yang beralamat kantor di Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya-Kebon Jeruk Jakarta. Metro TV adalah salah satu stasiun televisi yang berdiri sejak 25 Oktober 1999 yang dinaungi oleh Media Group yang dipimpin oleh Surya Paloh yang kemudian menjabat sebagai CEO

⁵⁵ Logo Kompas TV, <https://www.kompas.tv/>, diakses pada tanggal 18 september 2019 pukul 21.00 WIB

serta telah mampu mempekerjakan 280 orang karyawan dan sekarang telah mencapai 1200 orang karyawan.⁵⁶

Pada awalnya Metro Tv hanya tayang dalam kurun waktu 11 jam setiap harinya. Namun sejak tanggal 1 April 2001 Metro Tv mulai tayang hingga 24 jam dengan berbagai program unggulannya. Berita-berita yang ditayangkan lebih banyak terfokus pada informasi dunia industri dan program-program inspiratif seperti “Mario Teguh Golden ways”. Kemudian seiring berjalannya waktu program inspiratif tersebut tidak tayang kembali namun stasiun televisi Metro Tv ini lebih menayangkan informasi-informasi sosial politik, terlebih lagi jika tiba waktu pesta demokrasi yang kemudian memberikan informasi seputar pemilu, hanya program informasi terkait industri yang masih bertahan hingga sekarang.

d. INwes Tv

Berdiri sejak tanggal 5 Maret 2008 yang pada saat itu pertama kali masih dengan nama SUN TV kemudian hanya bisa dilihat melalui Indovision, Oke Vision dan Top Tv serta sebelum berubah menjadi Inews Tv stasiun televisi tersebut berubah dahulu namanya menjadi Sindo Tv yang baru diresmikan melalui izin

⁵⁶ Rahayu Setya W, *Biografi Metro TV*, <https://m.merdeka.com/metrotv/profil/>, diakses pada tanggal 19 september 2019

yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi RI pada tanggal 23 september 2014.⁵⁷

Selanjutnya, pada tanggal 6 April 2015 barulah berubah nama menjadi Inews Tv yang merupakan singkatan dari Indonesia Newws Televisi. Sesuai dengan namanya stasiun televisi tersebut memiliki program-program yang memberikan referensi bagi masyarakat indonesia yang dimana memberikan informasi yang terhangat.

F. Calon Presiden Pada Pilpres 2019

1. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin

a. Profil Joko Widodo

Lahir di surakarta pada tanggal 21 juni 1961. Merupakan anak dari pasangan Noto Mihadjo dan Sudjiatmi dan satu-satunya anak laki-laki dari empat bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh oleh Jokowi dimulai dari SDN 11 Tirtoyoso, dan melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Surakarta. Setelah lulus SMP ia melanjutkan di SMAN 6 Surakarta, serta pada saat kuliah ia melanjutkan studinya di UGM Fakultas Kehutanan, jurusan kehutanan.

Jokowi mempunyai seorang istri dan dikaruniai 3 orang anak, antara lain Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang

⁵⁷ Ringkasan Singkat Inews Tv, <https://www.mncgroup.com/microsite/inews-tv>, diakses pada tanggal 19 september 2019 pukul 03.53 WIB.

Pengarep. Jokowi adalah seorang politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang awalnya hanya seorang pengusaha kayu. Kemudian, karir politiknya naik dimulai saat ia terpilih menjadi walikota solo pada tahun 2005 dan terpilih kembali untuk kedua kalinya, namun ia tidak menyelesaikan jabatannya yang pada saat itu ia langsung mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta dan terpilih kembali, namun tak diselesaikan kembali masa jabatannya lagi hanya menjabat 2 tahun dan ia naik kembali bertarung pada pilpres 2014 dan menang lagi.

b. Profil Ma'ruf Amin

Lahir pada tanggal 11 Maret 1943 di Tangerang Banten. Riwayat pendidikan formal yang ia tempuh antara lain; SR (Sekolah Rayat) ditangeran pada tahun 1955, MI (Madrasah Ibtidaiyah) Tangerang tahun 1955, MTS (Madrasah Tsanawiyah) Tebu Ireng di Jombang tahun 1958, MA (Madrasah Aliyah) Tebu Ireng di Jombang pada tahun 1961, dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Ibnu Khaldun fakultas ushuludin pada tahun 1967.

Ma'ruf Amin mempunyai karir politik yang sangat panjang sampai akhirnya dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden Jokowi. Dimulai pada tahun 1973 menjabat sebagai DPR RI dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) hingga pada tahun 1999 yang

menjabat juga menjadi Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB.

2. Visi dan Misi Joko Widodo-Ma'ruf Amin

VISI :

"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong."

MISI :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.⁵⁸

Fokus penelitian dalam penulisan karya ilmiah kali ini akan menjurus sesuai dengan acuan gambaran umum dan lokasi penelitian yang telah dijelaskan diatas, dimana peneliti akan mendeskripsikan di bab 3

⁵⁸ Jokowi-Amin Indonesia Maju, <https://jokowiainid.id/visi-misi/>, diakses pada tanggal 25 september 2019 pukul 00.31 WIB

tentang bagaimana hasil survei politik yang digunakan sebagai alat *framing* dan *priming* kemenangan pasangan Calon Presiden Jokowi Ma'ruf pada Pemilihan Presiden tahun 2019 yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan anggota legislatif baik dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke pusat.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang hasil survei politik sebagai alat *framing* dan *priming* kemenangan pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf pada Pemilihan Presiden 2019. Dengan menggunakan teori *framing* dan *priming* dari Robert D Benford dan David A Snow yang menyatakan bahwa dalam membentuk *framing* dan *priming* harus menegosiasikan pemahaman bersama yang didefinisikan sebagai kebutuhan perubahan di beberapa kondisi permasalahan dan memfasilitasi tindakan politik sebagai peluang politik.

Framing dan *priming* yang dibentuk dalam sebuah kontestasi pemilihan umum merupakan sebuah bentuk gerakan media yang berakar pada sebuah referensi agar membentuk pola pikir setiap audiens. Hasil survei politik merupakan alat yang digunakan untuk pembentukan *framing* dan *priming* dalam setiap informasi yang disebarkan oleh media dan membutuhkan waktu serta periode penerbitan informasi. Dengan menelaah setiap berita melalui isi pemberitaan yang diterbitkan serta objek dan subjek yang menjadi pokok pembahasan dalam sebuah berita terkait hasil survei pada pemilihan presiden 2019.

A. Penggunaan Hasil Survei Politik Sebagai Alat *Framing* dan *Priming* oleh Pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf Pada Pilpres 2019

Peneliti menganalisa hasil penelitian yang dilakukan melalui kajian pustaka yang didapat oleh peneliti berdasarkan sumber-sumber yang

teruji kredibilitasnya untuk menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini. *Framing* dan *Priming* sebuah bentuk berita yang diciptakan untuk membentuk pola pikir si pembaca dan memberikan penilaian yang sesuai dengan kehendak penulis berita. *Framing* biasanya dibentuk dengan menampilkan sebagian fakta dan sebagian fakta lainnya dikaburkan serta mencoba membelokkan fakta secara halus melalui penyeleksian informasi dan *Priming* biasanya merupakan sebuah wacana yang dituangkan dalam sebuah berita yang melontarkan sebuah ide atau gagasan yang tidak mewakili keseluruhan tugas pokok dan fungsi sebuah kewenangan seseorang.

1. *Framing* Hasil Survei Politik

Pada pilpres 2019, kedua kandidat pada pilpres berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat. Calon presiden Prabowo-Sandi mendapat dukungan dari kalangan emak-emak. Dalam hal ini beberapa media mempublikasikan elektabilitas yang didapatkan oleh Prabowo-Sandi, dapat dilihat dari beberapa media yang memberitakan pembuktian yang diakui oleh para emak-emak. Beberapa media yang memberitakan elektabilitas yang didapat oleh Prabowo-Sandi dan bahkan dengan loyalitas mengkampanyekan Prabowo-Sandi, media yang disampaikan oleh merdeka adalah sebagai berikut :

“Kaum Perempuan tidak mau hanya diam dalam pilpres 2019. Mereka menjadi sorotan, khususnya kaum ibu-ibu. Sampai rela membagi waktu dengan keluarga demi memenangkan jagoannya. Kini mereka unjuk gigi. Keterlibatan emak-emak dalam politik tidak lepas dari hadirnya media sosial. Untuk menjadi pemicu. Mereka tak mau hanya berpangku tangan. Berdiam diri

menyaksikan dinamika politik. Apa lagi bagi mereka pendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi...Mama Tri, biasa dipanggil, mengaku sangat mengidolakan sosok Prabowo Subianto lantaran memiliki latar belakang militer. Itu membuatnya yakin bahwa sosok idolanya merupakan pemimpin yang tegas dan berwibawa.”⁵⁹

Dari redaksi berita diatas, peneliti melihat bahwa tim BPN Prabowo-Sandi fokus menargetkan pemilih mereka adalah dari kalangan emak-emak. Bahkan kaum emak-emak secara jelas mendukung Prabowo-Sandi dan mengkampanyekan ke media-media sosial. Dan kemudian Prabowo-Sandi mendapat dukungan dari emak-emak kabupaten pemekasan. Ketua koordinator pendukung emak-emak diwilayah jawa timur menyatakan dimedia tribunjatim.com, pernyataan salah satu emak-emak yang menjadi koordinator emak-emak manis jawa timur adalah:

“Emak-Emak adalah pionir kehidupan. Tanpa emak-emak, bapak-bapak kelimpungan. Karena itu emak-emak adalah relawan terkuat yang mampu mengawal Prabowo-Sandi di Jawa Timur khususnya kabupaten pemekasan, emak-emak di jawa timur khususnya pemekasan ini tahu mana yang terbaik. Pilihan emak-emak selalu tepat. Karena itu, emak-emak banyak merapat ke Prabowo-Sandi. Dengan emak-emak Prabowo-Sandi pasti menang.”⁶⁰

Prabowo-Sandi melakukan gerakan untuk menarik simpati pemilih dari kalangan emak-emak yang dimana fokus awal yang menjadi citra penarik pemilih tersebut adalah calon presiden Sandiaga Uno. Berita diatas terlihat bahwa optimisme kalangan emak-emak untuk

⁵⁹ Anisyah Al-Faqir, Emak-Emak tangguh Demi Prabowo Presiden, <https://www.merdeka.com/khas/emak-emak-tangguh-demi-prabowo-presiden.html> diakses pada tanggal 10 oktober 2019

⁶⁰ Kuswanto Ferdian, Prabowo-Sandi Dapat Dukungan ‘Emak-Emak Manis’ di Pemekasan, <https://jatim.tribunnews.com/2019/01/20/prabowo-sandi-dapat-dukungan-emak-emak-manis-di-pamekasan> diakses pada tanggal 11 oktober 2019.

memenangkan Prabowo-Sandi sangat antusias. Gerakan emak-emak sebetulnya mempunyai daya tarik yang lebih untuk emak-emak lainnya karena secara psikologis, emak-emak memiliki keterikatan perasaan antara satu dengan yang lain.

Bukan hanya dipemekasan, tim BPN Prabowo-Sandi melakukan gerakan mengkampanyekan Prabowo-Sandi di berbagai daerah lainnya yang kemudian menjadi sorotan publik serta media yang melihat tingkat elektabilitas secara faktual dilapangan semakin meningkat. Istri Sandiaga Uno terjun langsung kelapangan dan mendapatkan respon baik dari masyarakat di sukabumi maupun daerah lainnya. Di sukabumi istri Sandiaga Uno bersama emak-emak lainnya yang kemudian mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo-Sandi dengan nama komunitas yang disebut dengan komunitas Barisan Emak dan Eneng Berdaya (BEB). Lihat foto dibawah ini!



Gambar 3.1 Deklarasi mendukung Prabowo-Sandi, Komunitas Emak dan Eneng Sukabumi

Sumber : Merdeka.com

Sebelum terjadinya pendeklarasian komunitas BEB tersebut, terpilihlah ibu Susan sebagai ketua umum komunitas BEB sukabumi dan deklarasikan di dilaksanakan di Jalan Casablanca Blok C, Perumahan Puri Cibeureum II, Sukabumi. Setelah proses deklarasi selesai ibu Susan menyatakan bahwa:

“Kami harapkan program seperti ini ada seharusnya di pemerintah, kalau kita UMKM yang mengusulkan mendatangkan acara seperti ini ke pemerintah kan harus bayar. Mudah-mudahan dengan nanti terpilihnya Prabowo-Sandi, kegiatan seperti ini bisa lebih besar dan banyak lagi. Maka dari itu kita dukung Prabowo-Sandi untuk menjadi Presiden RI,” saat di wawancarai oleh wartawan merdeka.com di lokasi pada hari minggu, (6/1).⁶¹

Di media lain seperti detik.com pun memberitakan hal yang sama saat di sukabumi mendeklarasikan dukungan terhadap prabowo sandi, redaksi beritanya sebagai berikut:

“Komunitas BEB atau disebut juga Barisan Emak dan Eneng Berdaya Sukabumi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Acara deklarasi dari komunitas BEB Sukabumi ini digelar di jalan Casablanca Blok C, Perumahan Puri Cibeureum II, Sukabumi. Hadir juga dalam kesempatan ini istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno yang ikut memberikan pelatihan. Dukungan ini digaungkan karena pasangan Prabowo-Sandi dinilai mampu memajukan kewirausahaan bagi kelompok emak-emak...”⁶²

Menurut peneliti, gerakan yang dilakukan Prabowo-Sandi untuk menarik minat publik telah terlihat bahwa emak-emak diberbagai daerah mendeklarasikan untuk optimisme mendukung pasangan calon

⁶¹ Raynaldo Ghiffari Lubabah, Dukungan Emak-Emak Sukabumi Untuk Prabowo-Sandi, <https://www.merdeka.com/politik/dukungan-komunitas-emak-emak-sukabumi-untuk-prabowo-sandi.html> diakses pada tanggal 11 oktober 2019

⁶² Raras Prawitaningrum, Komunitas Emak-emak di Sukabumi Deklarasikan Dukung Prabowo-Sandi, <https://news.detik.com/berita/d-4373120/komunitas-emak-emak-di-sukabumi-deklarasi-dukung-prabowo-sandi>, diakses pada tanggal 17 oktober 2019

presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi. Ketika berita yang di publikasikan diberbagai daerah menyatakan sikap mendukung Prabowo-Sandi maka secara perlahan daerah yang lain akan menilai bahwa calon tersebut merupakan calon presiden pilihan rakyat dan secara tidak langsung emak-emak di berbagai daerah lainnya akan simpati dan mengikuti gerakan tersebut.

Dalam kontestasi pilpres, melawan incumbent memang tidak mudah karena dalam hal penguasaan sumber daya seperti sumber daya financial, aparatur politik dan bahkan sumber daya fasilitas negara yang mampu dikelola oleh incumbent karena memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola politik anggaran keuangan.⁶³ Namun ruang lingkup yang dikuasai oleh incumbent tidak mungkin menyeluruh, ada keterbatasan yang dimiliki sehingga mampu di manfaatkan oleh pihak oposisi.

Sebagai contoh dapat kita lihat calon presiden Prabowo-Sandi mampu meningkatkan elektabilitasnya di beberapa daerah seperti Pulau Sumatera dan Maluku. Dimana elektabilitas Prabowo-Sandi meningkat yang sebelumnya 37,1% menjadi 44,8%.⁶⁴ Pasangan Prabowo-Sandi terus bergerak agar dapat menjadi sorotan publik dan simpati dari masyarakat Indonesia serta terfokus pada elektabilitasnya yang telah tertinggal oleh pasangan incumbent yakni Jokowi-Ma'ruf

⁶³ Andre Ristian, Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 195

⁶⁴ Tim CNN Indonesia, Survei CRC: Elektabilitas Prabowo di Sumatera Kalahkan Jokowi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190210180403-32-367933/survei-crc-elektabilitas-prabowo-di-sumatera-kalahkan-jokowi>, diakses pada tanggal 19 oktober 2019.

yang sebelumnya Jokowi merupakan presiden terpilih pada periode 2014-2019.

Namun, ketika banyak media yang memperlihatkan pergerakan pasangan calon presiden Prabowo-Sandi, beberapa waktu kemudian tim survei melakukan survei lapangan, LSI Denny JA mengeluarkan hasil survei yang di publish pada tanggal 12 April 2019 yang menceritakan berdasarkan hasil survei terkait keunggulan Jokowi-Ma'ruf di segmen emak-emak yang dimana Jokowi sebagai petahana mendapatkan kedudukan tertinggi dibandingkan Prabowo-Sandi, di liputan6.com peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menyebutkan:

“...Presentase dukungan dari emak-emak sebesar 59,9% sampai 69,8%, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan dukungan emak-emak sebesar 30,2% hingga 40,1%. Jokowi-Ma'ruf juga unggul di semua segmen termasuk segmen muslim, minoritas, emak-emak, terpelajar, wong cilik, dan kaum muda yang dikenal dengan milenial. Jokowi-Ma'ruf selalu unggul rata-rata 20% di atas pasangan calon presiden Prabowo-Sandi. Di kalangan milenial Jokowi-Ma'ruf mendapatkan elektabilitas sebesar 54,9% hingga 64,8%..”⁶⁵

Berita yang dirilis secara tema berbeda dengan topik yang dibahas pada capres Prabowo Subianto, Capres 02 dipublikasikan sebagai upaya-upaya untuk mendongkrak elektabilitas sedangkan Jokowi langsung hasil elektabilitasnya yang dirilis melalui lembaga survei. Memang secara faktual tidak dapat dipungkiri bahwa ada landasan yang kuat ketika membahas langsung menyentuh pada presentase

⁶⁵ Yopi Makdori, LSI Denny JA: Jokowi-Ma'ruf Unggul di Segmen Emak-Emak, <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3940491/lsi-denny-ja-jokowi-maruf-unggul-di-segmen-emak-emak>, diakses pada tanggal 01 oktober 2019

elektabilitas karena Jokowi merupakan calon presiden incumbent yang telah duduk dikursi eksekutif sebelumnya.

Dari narasi berita yang publikasikan oleh liputan6.com terkait hasil survei menunjukkan beberapa fakta yang mereka dapatkan berdasarkan hasil survei yang di teliti oleh lembaga survei LSI Denny JA. Berdasarkan isi yang dituliskan, peneliti melihat yang menjadi topik pembahasan di berita tersebut adalah pasangan calon presiden dari petahana dimana di berita tersebut petahana mempunyai nilai yang jauh lebih baik dibandingkan pasangan calon presiden nomor urut 02. Ini yang kemudian membuat pembaca menilai kepribadian seorang Jokowi dengan dibandingkan hasil kerja yang telah diperbuat oleh calon presiden petahana tersebut.

Dari berita diatas, pasangan calon presiden nomor urut 01 tidak memiliki kelemahan sama sekali dari segi unsur dimanapun. Seluruh segmen disebutkan bahwa Jokowi-Ma'ruf lebih unggul rata-rata hampir 20% dibandingkan pasangan calon presiden Prabowo-Sandi. Jokowi dinilai memiliki prestasi yang sangat baik dibandingkan Prabowo. Kemudian, dari rilis oleh LSI Denny JA kembali di media Republika.co dan disini yang menjadi judul utama adalah prabowo yang dinilai unggul di salah satu segmen, isi berita yang dimuat terkait hasil survei politik adalah :

“Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo-Sandi unggul dikantong pemilih terpelajar pada pemilu presiden 2019. Peneliti senior LSI Adjie Alfaraby saat memaparkan hasil

surveinya, dikantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (7/2), mengatakan populasi pemilih ini hanya sebesar 11,5%. Namun, dalam pernyataan elektoral yang ketat, populasi 11,5% cukup signifikan. Selain itu, pemilih kaum terpelajar cukup penting karena kemampuan mereka mempengaruhi opini publik. “Dikantong pemilih ini, Prabowo-Sandi unggul dibandingkan Jokowi-Ma’ruf. Dukungan Prabowo-Sandi di pemilih terpelajar mencapai 44,2%. Sementara dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf dikantong pemilih ini sebesar 37,7%,” kata Adjie. Meski unggul, keunggulan Prabowo-Sandi hanya dibawah 10% terhadap Jokowi-Ma’ruf di segmen pemilih ini. Ada sebesar 18,1% pemilih kalangan terpelajar yang belum menentukan pilihan. Prabowo-Sandi unggul dikantong pemilih terpelajar, namun Jokowi-Ma’ruf unggul di lima kantong suara dari enam kantong suara yang diteliti. “Jokowi-Ma’ruf menang 5-1 atas Prabowo-Sandi”, katanya lagi...”⁶⁶

Dari redaksi diatas, peneliti melihat fakta-fakta yang dituliskan berdasarkan latar informasi yang dituliskan pada berita ini adalah elektabilitas prabowo yang di jadikan judul utama. Terdapat kutipan sumber yang utama dan tempat mengeluarkan rilis hasil survei tersebut dan dijelaskan seberapa besar tingkat elektabilitas Prabowo-Sandi pun di jelaskan dari kalangan “Pelajar”. Namun, pada berita ini dijelaskan secara runtutannya yang dengan halus membuat pembaca mengarahkan fokusnya pada kesimpulan bahwa Jokowi-Ma’ruf merupakan calon petahana dan juga merupakan calon presiden yang mempunyai tingkkat elektabilitas yang sangat jauh lebih tinggi di bandingkan calon presiden Prabowo-Sandi.

Peneliti juga melihat berita tersebut menarik para pendukung Prabowo-Sandi untuk melihat berita tersebut dan tertarik untuk membaca berita yang dipublikasikan oleh republik.co.id. Selanjutnya,

⁶⁶ Andri Saubani, Survei: Prabowo-Sandi Unggul di Kalangan Pemilih Terpelajar, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/19/02/07/pmka8o409-survei-prabowosandi-unggul-di-kalangan-pemilih-terpelajar> diakses pada tanggal 2 oktober 2019

penulis berita membuat runtutan penulisan berita yang tersusun dengan sistematis dengan pertama mengarahkan fokus pada judul yang di tulis kemudian dengan melihat keisi berita pembaca akan mengambil kesimpulan yang jelas berbeda dengan judul yang dituliskan oleh wartawan, kesimpulan yang diambil oleh si pembaca akan mengarah kepada keunggulan Jokowi jika si pembaca menilai lembaga survei yang melakukan survei tersebut kredibilitasnya masih tinggi.

Kemudian, Peneliti menyeleksi beberapa berita yang peneliti temukan di beberapa media yang kemudian akan dicantumkan kedalam pembahasan ini. Survei dari SMRC yang ketika itu masih bergejolaknya isu-isu hangat terkait pemilihan umum presiden yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi yang kemudian muncul video-video kecurangan di media sosial seperti *instagram* dan *facebook*. Bahkan, didalam sebuah media tim pemenangan Prabowo-Sandi mengungkapkan 3 kecurangan yang menurut para BPN mereka telah memiliki bukti-bukti data yang valid. Berikut 3 kecurangan yang mereka ungkapkan di hotel sahid, jakarta:

“...salah satu tokoh yang memaparkan kecurangan pilpres yang terjadi adalah Prof. Laode dan tim internal BPN yang ditugaskan secara khusus untuk menangani persoalan DPT dan IT. Berikut jenis kecurangan yang menjadi sorotan BPN Prabowo-Sandi.(1)*DPT Tuyul*. “Inilah sebenarnya persoalan DPT yang disebut DPT tuyul. 6,1 juta DPT ganda, dan 18 juta DPT invalid yang hanya terdapat di jawa. Kita cek kelapangan selalu ada DPT tuyul atau DPT siluman,” jelas Choirul. “1 TPS itu bisa ada 228 pemilih bertanggal lahir sama, dan itu jumlahnya bukan hanya 12, 1 juli bisa ada 9,8 juta orang,” lanjut Choirul. (2) *Salah Input*

*Situng KPU Rugikan Prabowo-Sandi. (3) Tanpa Kecurangan, BPN Klaim Prabowo Sandi Menang 54,4%. Prof. Laode mengatakan, data tanpa kecurangan tabulasi C1 dari relawan Prabowo-Sandi menunjukkan keunggulan signifikan. Menurut perhitungan BPN hingga saat itu, paslon Prabowo-Sandi unggul 54,4%. Sementara Jokowi-Ma'ruf mencapai 44,24%...*⁶⁷

Ketika tidak ada pernyataan dari pihak BPN dan tidak adanya jumpa pers antara tim pemenangan Prabowo-Sandi dengan beberapa media, sebetulnya para pendukung Prabowo-Sandi tak akan begitu memperhatikan hasil pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2019 ini karena sejarah sebelumnya menunjukkan penyelenggara pemilihan umum tidak begitu terlihat mencolok terjadi kecurangan tersebut. Meskipun kita semua mengetahui bahwa dalam negara demokrasi potensi kecurangan pada pemilu akan selalu terjadi.

Yang kemudian menjadi perbedaan pada pilpres 2019 kali ini adalah ketika BPN menyatakan sikap dengan tegas bahwa mereka tidak ingin menandatangani semua hasil rekapitulasi suara pilpres ditingkat nasional.⁶⁸ Secara teoritis pelaksanaan pemilu di Indonesia sudah sesuai dengan asas-asas konstitusional dan bahkan dalam ajaran islam sudah sangat sesuai. Namun secara praktis pelaksanaan pemilu di Indonesia masih banyak ditemukan ketidak sesuaian dengan teori yang telah dirumuskan terutama dalam nilai persamaan dan keadilan.⁶⁹

⁶⁷ 3 Kecurangan Pilpres yang Diungkap BPN Prabowo-Sandi, <https://kumparan.com/@kumparannews/3-kecurangan-pilpres-yang-diungkap-bpn-prabowo-sandi-1r4w6Oj35hF> diakses pada tanggal 11 oktober 2019

⁶⁸ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190517/15/923864/bpn-prabowo-sandi-tolak-teken-hasil-rekapitulasi-nasional-dan-pengesahan-pemilu-2019> diakses pada tanggal 8 oktober 2019

⁶⁹ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 225

Selanjutnya, kecurangan yang terjadi pada masa pilpres 2019 ini sangat menjadi sorotan publik ketika banyak media yang mempublikasikan berita yang terjadi betapa dinamika politik yang terjadi saat ini begitu sangat memprihatinkan. Maka dari itu, sudah jelas dinamika semua ini terjadi karena permainan media massa. Dalam hal terjadinya dinamika pemilu yang terindikasi curang menurut pihak BPN, ini mengindikasikan bahwa para pendukung Prabowo-Sandi menganggap pemilu serentak dan pemilihan presiden sudah dinilai tidak jurdil lagi. Pernyataan para pendukung Prabowo-Sandi diperkuat oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih yang dipublikasikan di media rri.co.id dalam diskusi di forum tebet, menyatakan bahwa:

“Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi berpendapat dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2019 sudah membuat resah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. “Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut berimbas pada terjadinya krisis kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu,” kata Adhie dalam diskusi bertema “Membongkar Modus Operandi Kecurangan Pilpres” yang digagas oleh Forum Tebet, di Jakarta Kamis (9/5/2019) petang...”⁷⁰

Semua itu ditangkis oleh lembaga survei SMRC. Melihat beberapa postingan media sosial yang sedang gencar-gencarnya menyerang KPU RI, namun diposting tersebut tidak disertakan angka kecurangan yang terjadi, kemudian SMRC mengeluarkan rilis hasil surveinya sebagai alat *Framing* yang berisi sebagai berikut:

⁷⁰ Heri Firmansyah, Dugaan Kecurangan Pemilu Turunkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat, http://rri.co.id/post/berita/670554/pemilu_2019/dugaan_kecurangan_pemilu_turunkan_tingkat_kepercayaan_masyarakat.html diakses pada tanggal 28 september 2019 puku; 22.00 WIB.

“Saiful Mujani Research an Consulting (SMRC) menggelar survei opini publik terkait pemilu 2019. Hasilnya, mayoritas publik percaya pemilu 2019 sudah berlangsung jujur dan adil. “Menurut publik, secara umum pemilihan umum berlangsung jujur dan adil, meskipun ada sebagian kecil yang menyatakan tidak jujur dan adil,” kata Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas rilis survei nasional ‘kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca peristiwa 21-22 mei: sebuah evaluasi publik di kantornya, jakarta pusat, minggu (16/4/2019). Survei digelar pada 20 mei- 1 juni 2019 dan survei ini menggunakan *multistage random sampling* dengan 1.220 responden yang berasal dari semua provinsi dan seluruh indonesia. *Margin of error* survei ini 3,05%...”⁷¹

Dari berita tersebut, peneliti melihat berita tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk menggalang opini publik yang begitu kencang dari masyarakat pasca pencoblosan di pemilihan umum presiden. Selain dari itu, persaingan yang begitu sengit yang terjadi pada kontestasi pemilihan umum presiden pada bulan april lalu membentuk dua kelompok yang sangat jelas yang dimana semua pendukung para pasangan calon saling menyerang dimedia sosial yang kemudian menenggalamkan semua topik dan isu sosial lainnya. Itu semua dilakukan oleh para penggiat aktivis media sosial seperti di lebanon yang dimana blog dan grup daring digunakan sebagai alat politik.⁷² Dengan demikian, ketertarikan masyarakat untuk mengetahui perkembangan pemilihan presiden semakin tinggi.

Detik.com membuat berita yang di muat dengan menggunakan hasil survey yang secara sintaksis berita tersebut menjelaskan

⁷¹ Ibnu Haryanto, Survei SMRC: 69% Publik Menilai Pilpres 2019 jurdil, <https://news.detik.com/berita/4587989/survei-smrc-69-publik-menilai-pilpres-2019-jurdil> diakses pada tanggal 28 september 2019 pukul 10:42 WIB

⁷² Bambang Mudjiyanto, Literasi Internet dan Partisipasi Politik Masyarkat Pemilih Dalam Aktifitas Pemanfaatan Media Baru, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, vol. 16, No. 1, 2012, hlm. 5

bagaimana masyarakat menanggapi pasca pemilihan presiden 2019, ada yang diuntungkan dengan adanya berita tersebut yaitu pasangan Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden terpilih untuk periode kedua untuk Jokowi dan kali pertama untuk Ma'ruf Amin. Detik.com juga menjelaskan semua proses yang dilakukan oleh SMRC untuk mendapatkan hasil survei tersebut menggunakan *random sampling* dan tentunya rumus tersebut tidak pernah ketinggalan dicantumkan *margin of error* yang agar ketika masyarakat melihatnya menjadi tempat bahan acuan masyarakat.

Framing yang dibentuk menggunakan hasil survei dengan tema diatas dapat kita bandingkan dengan publikasi berita yang memiliki konteks yang berbeda namun tema dan topiknya sama yaitu publikasi berita yang dibuat oleh rri.co.id yang berlangsung di forum tebet dengan tema "Membongkar Modus Operandi Kecurangan Pilpres". Sangat berbeda isi yang dipublikasi pada media rri.co.id dengan berita yang diluncurkan oleh detik.com terkait penilaian publik terhadap pemilihan umum.

Namun memang, di berita rri.co.id tersebut menceritakan isi tentang hasil diskusi dan sedangkan dari detik.com didapatkan berdasarkan hasil survei politik yang dilakukan oleh SMRC. Walaupun demikian, hasil diskusi tersebut mempunyai landasan yang kuat yang dimana melalui proses kajian-kajian yang dilakukan pada

diskusi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang terjadi di beberapa daerah yang kemudian disusun untuk mendapatkan berbagai kesimpulan yang kemudian dipublikasikan.

Framing berdasarkan disiplin keilmuannya merupakan sebuah pembingkai berita yang bertujuan untuk mengarahkan opini publik. Jadi, berdasarkan berita yang dituliskan secara pembingkai berita-berita diatas mengarahkan kepada pembaca bahwa agar pembaca terbentuk opini bahwa dalam segala bidang di pemilu 2019 selain sebagai petahana, Jokowi juga merupakan kandidat calon presiden yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang jauh diatas Prabowo, secara singkat peneliti melihat berita tersebut menyudutkan pasangan calon presiden Prabowo Subianto.

Didalam proses demokrasi, *framing* dan *priming* mempunyai posisi yang sangat strategis yang mampu membentuk dan membuka semua jalan menjadi peluang politik dengan cara merespon tindakan-tindakan yang terjadi dengan *framing* dan *priming*. Responsibilitas tindakan yang memiliki nilai lebih adalah hasil survei yang kemudian dibingkai atau pun ada pula yang menjadi lontaran ide dengan lantang dan terus menerus. Peluang politik akan semakin terbuka lebar jika agenda tersebut dijalankan dengan berbagai proses yang sesuai dengan pembingkai dan pelontaran ide.

2. *Priming Hasil Survey Politik*

Akibat yang ditimbulkan dalam pemilu serentak 2019 ini terlihat sangat jelas bahwa dalam pelaksanaannya masih Terdapat surat suara yang telah tercoblos dimalaysia, dalam surat suara tersebut terlihat yang tercoblos adalah pasangan calon presiden nomor urut 01 yaitu Jokowi-Ma'ruf, sekaligus beserta calon legislatif nomor urut 02 atas nama Davin Kirana. Dalam hal ini jika penyelenggara pemilu tidak kaku dan melakukan koordinasi dengan berbeagai pihak maka isu tersebut tidak akan menjadi perbincangan hangat, namun semua itu tidak dengan sigap dievaluasi oleh penyelenggara pemilu yang kemudian muncul di beberapa media informasi. Peneliti akan menampilkan beberapa dokumentasi terhadap isu yang beredar tersebut. Berikut foto bukti surat suara yang sudah tercoblos!



Gambar 3. 2 *Surat Suara yang Sudah Tercoblos Sebelum Pemilihan di Malaysia*

Sumber : Tribunnews.com

Ternyata isu yang berkembang pada momen pilpres di tahun 2019 ini tidak cukup sampai disitu saja, setelah terjadinya surat suara yang

tercoblos diberbagai daerah dan sampai menjadi trending topic di media-media massa, kemudian timbul lagi isu setelah berakhirnya masa pencoblosan pemilihan umum serentak 2019. Dan muncul kembali isu yang membuat publik terkejut bahwa isu tersebut menyebutkan KPU RI melakukan kesalahan terkait input hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden. Beredar di media sosial bahwa pemilihan presiden yang terjadi tidak berlangsung secara jujur dan adil, salah satu postingan netizen yang memposting kecurangan pemilu yang terjadi di TPS, Gambar dibawah ini ditunjukkan netizen di media sosialnya dengan membandingkan antara C1 asli dari TPS dan C1 yang di muat oleh KPU:



Gambar 3.3 *Bukti Kecurangan yang diposting oleh Netizen*
sumber : Suaraindonesia.com

Untuk memperkuat argumen diatas peneliti akan menampilkan berita yang menyebutkan dengan jelas bahwa beredar isu yang telah terjadi yaitu kesalahan input rekapitulasi hasil peungutan suara pilpres dan mengakibatkan pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf suaranya

bertambah dan Prabowo-Sandi menyusut. Kejadian tersebut terjadi pada TPS 003 DKI Jakarta Timur kelurahan Cakung timur!

The image shows a physical ballot paper (TPS) and a digital interface from the Komisi Pemilihan Umum (KPU). The ballot paper, labeled 'Lembar 2' and 'C1-PPWP-02', lists two candidates for President and Vice President. Candidate 01 is Ir. H. JOKO WIDODO and Prof. Dr.(H.C) KH. MA'RUF AMIN, with 87 votes. Candidate 02 is H. PRABOWO SUBIANTO and H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, with 105 votes. Handwritten notes on the ballot indicate 'Tujuh puluh Saha' for candidate 01 and 'Seratus delapan puluh Lima' for candidate 02. The digital interface below shows a filter for 'TPS 003' and a table of vote counts. The table shows 99 votes for candidate 01 and 137 votes for candidate 02, which is significantly higher than the 105 votes on the physical ballot.

IV. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON (1)	SUARA SAH (2)
01. Ir. H. JOKO WIDODO Prof. Dr.(H.C) KH. MA'RUF AMIN <i>Tujuh puluh Saha</i>	87
02. H. PRABOWO SUBIANTO H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO <i>Seratus delapan puluh Lima</i>	105

V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
URAIAN (1)	JUMLAH (2)
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.01 + IV.02)	254

DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
URAIAN	JUMLAH (L+P)
PEMILIH TERDAFTAR (DPT)	265
PENGGUNA HAK PILIH	239

PEROLEHAN SUARA	
URAIAN	SUARA SAH
1 (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	99
2 (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	137

Gambar 3.4 Perbedaan Antara C1 dari TPS dan Input Data Situng Oleh KPU

Sumber : Republika.co.id

Dari data diatas terlihat jelas antara perbedaan antara hasil pemilihan suara yang di dapat dari TPS 003 dan hasil input situng dari KPU. Berdasarkan foto diatas peneliti melihat ada kejanggalan yang terjadi yang membuat sorotan banyak mata publik. Kesalahan input yang dilakukan oleh KPU menoreh banyak kecamatan terkhusus oleh para pendukung Prabowo-Sandi yang melihat kesalahan input tersebut sebagai kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak KPU RI

yang kemudian membentuk pola pikir masyarakat terhadap KPU khususnya para pendukung Prabowo berkurang tingkat kepercayaannya terhadap pemilihan umum presiden serta menolak hasil pemilihan presiden tersebut. Karena, dalam konteks negara berdemokrasi penyelenggara pemilu haruslah bersifat independen yang dilindungi oleh UUD 1945.⁷³

Secara jelas para pendukung Prabowo tidak menerima keputusan hasil pemilihan umum tersebut dan menimbulkan gerakan aksi menuntut di kantor Bawaslu RI untuk menyatakan sikap untuk tidak menerima hasil pilpres tersebut. Salah satu media mempublikasikan berita penolakan tim Prabowo beserta para pendukungnya, isi beritanya adalah:

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2019, Selasa (21/5/2019) pukul 01:46 dini hari. Paslon Jokowi-Ma’ruf unggul atas Paslon Prabowo-Sandi. Namun hasilnya ditolak kubu Prabowo-Sandi. “Jelas kita menolak hasil pilpres,” kata juru debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Oleh karena itu, Riza Patria mengatakan demonstrasi itu tetap berjalan pada 22 Mei 2019. Baginya rekapitulasi tetap penuh kecurangan. “Ini hasil rekapitulasi yang kami yakini banyak kecurangan, maka kami menuntut keadilan,” kata dia. Riza menilai demonstrasi ini akan berdampak besar pada aspirasi masyarakat...”⁷⁴

Para pendukung Prabowo-Sandi dengan tegas dan berani turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa yang menyatakan bahwa para pendukung Prabowo Sandi menolak hasil pemilihan umum presiden

⁷³ Suparman Marzuki, Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 3 Juli 2008: 393-412, hlm. 399

⁷⁴ Felix Nathaniel, Tolak Hasil Pilpres 2019, BPN: Demonstrasi Tetap Jalan, <https://tirto.id/tolak-hasil-pilpres-2019-bpn-demonstrasi-tetap-jalan-dTcc> diakses pada tanggal 03 Oktober 2019

pada tahun 2019. Gedung Bawaslu RI dipenuhi oleh massa para pendukung Prabowo-Sandi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Kedaulatan Rakyat pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut. Mereka berkumpul di Gedung Bawaslu RI sambil menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Padahal pemilu seharusnya menciptakan perdamaian dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang berbeda-beda serta mampu menciptakan pemerintahan yang dapat diterima semua pihak.⁷⁵



Gambar 3.5 *Massa Gerakan Kedaulatan Rakyat
Demo di Gedung Bawaslu RI*

Sumber : Katadata.co.id

Bahkan pada tanggal 22 Mei tersebut para pendemo ada beberapa yang menjadi korban aksi tersebut karena terjadi bentrok antara para pendemo dan aparat keamanan dan pada saat itu Prabowo menjenguk korban aksi 22 Mei tersebut. Berikut ini foto korban yang dijenguk oleh Prabowo:

⁷⁵ Andrew Reynold, "Merancang Sistem Pemilihan Umum" dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, Bandung: Mizan, 2001, hlm.102



Gambar 3.6 *Prabowo Jenguk Korban Aksi 22 mei.*
Sumber : Detik.com

Sebelum hasil rekapitulasi diumumkan oleh KPU, dari awal ketika penghitungan quick count pilpres 2019 berlangsung para pendukung Prabowo-Sandi seakan tidak menerima kekalahan dan tidak ingin jagoannya kalah dalam pertarungan di pilpres 2019. Pada saat proses pemungutan suara telah selesai, para pendukung Prabowo berkumpul di kediamannya, disana Prabowo Subianto klaim kemenangan hasil exit poll. Disana para pendukung prabowo menuding hasil quick di televisi tidak benar, mereka menyerukan untuk matikan televisi dan berteriak “Prabowo Presiden”.⁷⁶

Sampai ketika telah proses rekapitulasi selesai dan KPU mengumumkan kemenangan menetapkan Jokowi-Ma'ruf unggul pada hasil tersebut dan sejak saat itu para pendukung Prabowo-Sandi melakukan aksi yang puncaknya pada tanggal 22 mei 2019. Ketika para pendukung Prabowo-Sandi yang lagi gencar-gencarnya melakukan aksi unjuk rasa serta menyatakan sikap untuk tidak

⁷⁶ Muhammad Radityo, Prabowo Kalah di Quick count Pilpres 2019, pendukung serukan Matikan TV, <https://www.merdeka.com/peristiwa/prabowo-kalah-di-quick-count-pilpres-2019-pendukung-serukan-matikan-tv.html>, diakses pada tanggal 18 oktober 2019

menerima hasil pemilihan umum presiden baik melalui media ataupun secara terang-terangan turun kejalan. Kemudian, ada beberapa media yang melakukan *priming* dengan menggunakan hasil survei politik. Berikut ini adalah berita yang ditemukan peneliti yang memiliki unsur *priming* yang sangat kental, isi berita tersebut adalah :

“Meski Prabowo-Sandi dinyatakan kalah dalam Pilpres 2019, sebanyak lebih dari 50 persen pendukungnya menerima hasil pemilu 2019. Hal ini ditunjukkan pada jajak pendapat yang di adakan Litbang Kompas. Jajak pendapat tersebut dipublikasikan oleh Litbang Kompas pada senin 17/6/ 2019. Pengumpulan pendapat ini dilakukan melalui telepon pada 27-28 mei 2019. Sebanyak 536 reponden dipilih secara acak bertingkat di 17 kota besar di indonesia. Tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error +- 4,2%...”⁷⁷

Berdasarkan isi berita yang dimuat oleh Detik.com, sejauh ini peneliti melihat media yang memuat berita ini adalah untuk mem-*priming* hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU yang di posisi ini Jokowi-Ma’ruf mendapatkan suara lebih tinggi dibandingkan Prabowo-sandi. Menandai secara singkat bahwa berita diatas termasuk bentuk *priming* adalah ketika media lainnya melayangkan berita yang sama. Tentu dalam melayangkan kesamaan ini bertujuan untuk membuat tajuk utama tentang hasil pemilu yang diputuskan oleh KPU agar mendapat legitimasi dari masyarakat Indonesia.

Berita yang sama kemudian muncul juga yaitu dari tribun yang berisi tentang :

⁷⁷ Tim Detikcom, “Prabowo Jajak Pendapat Kompas : 53,5% Pendukung Terima Hasil Pemilu, <https://news.detik.com/berita/d-4589022/jajak-pendapat-kompas-535-pendukung-prabowo-terima-hasil-pemilu>, diakses pada tanggal 25 september 2019 pukul 05.41 WIB

“...Litbang Kompas melakukan jajak pendapat pada tanggal 27-28 Mei 2019 terhadap 536 responden tentang hasil pemilu 2019. Hasilnya, sebanyak 96,4% responden yang mendukung Jokowi-Ma’ruf menyatakan menerima apapun hasil pemilu. Sementara pada responden yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi, jumlah yang mengaku menerima hasil pemilu mayoritas kecil, namun tetap mayoritas. Sebanyak 53,5% responden pendukung Prabowo sandi menerima apapun hasil pemilu...”⁷⁸

Dari berita yang muncul di tribun tersebut, peneliti melihat nyaris tidak ada perbedaan yang substansial pada berita yang dipublish oleh Detik.com. Hanya kalimat pembuka saja yang membedakan, ini menunjukkan bahwa media serentak membuat tema pemilihan yang telah usai dan ditetapkan oleh KPU tersebut ditujukan agar mendapat legitimasi dari masyarakat. Legitimasi dari masyarakat itu sangat penting ketika kita melihat jalannya proses demokrasi yang terjadi di indonesia yang utama adalah pemilihan umum yang pemimpinnya dipilih secara langsung oleh rakyat, maka dari itu ada berkesinambungan antara hasil pemilihan umum yang diperoleh Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019 tersebut.

Selanjutnya dari media lain yang mengeluarkan hasil survei Kompas sebagai alat *priming* adalah berita dari media online yaitu Kompas yang menyebutkan bahwa :

“...Sementara jumlah responden pendukung Prabowo-Sandi yang menerima hasil pemilu lebih kecil, tetapi tetap mayoritas. Sebanyak 53,5% responden pendukung Prabowo-Sandi mengaku menerima apapun hasil pemilu. Sedangkan ada 36,8% responden pendukung Prabowo-Sandi yang menolak apapun hasil pemilu.

⁷⁸ Hasil Jajak Pendapat Litbang Kompas 53,5% pendukung Prabowo-Sandi Menerima Hasil Pemilu, <https://manado.tribunnews.com/2019/06/17/hasil-jajak-pendapat-litbang-kompas-535-persen-pendukung-prabowo-sandi-menerima-hasil-pemilu>, diakses pada tanggal 25 september 2019 pukul 07.12 WIB

Sebanyak 3,5% lain mengatakan menerima hasil pemilu hanya jika Prabowo menang. “Mayoritas responden jajak pendapat *kompas* Yohan Wahyu seperti dikutip di harian *kompas*, Senin (17/6/2019)...”⁷⁹

Jika peneliti menelaah berita yang diterbitkan oleh Kompas.com tersebut sedikit sekali perbedaan yang terlihat berita hasil survei yang dibuat di detik.com dan tribunnews.com nyaris tidak terlihat perbedaannya pula dari mulai tema yang diangkat, data-data yang dipublikasikan diberita tersebut diantara ketiga berita tersebut pun sama. Berita tersebut dimunculkan yang kemudian menjadi perbincangan hangat oleh publik.

Ini membuktikan bahwa presiden Jokowi-Ma'ruf yang terpilih kembali di pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, dalam hal ini berita tersebut selalu dimunculkan tentunya memiliki tujuan agar menjadi *tranding topic* dan dibaca oleh publik yang kemudian penilaian positif terhadap penyelenggara pemilu dan citra Jokowi yang terpilih tersebut mendapatkan legitimasi baru dari pendukung yang mengusungnya maupun partai oposisi yang dengan perlahan presiden dirangkulnya kembali. Kemudian akurat.co juga mempublikasikan berita yang sama pula dengan isi redaksi :

“Jajak Pendapat Litbang merilis hasil survei terbaru yang berisi tentang hasil pemilu presiden 2019. Hasilnya sangat menarik. Dari jajak pendapat tersebut, pendukung masing-masing pasangan calon menerima apapun hasil pilpres 2019. Dan yang menarik adalah meski Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinyatakan kalah pada

⁷⁹ Jajak Pendapat Litbang Kompas : Mayoritas Publik Menerima Hasil Pemilu, <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/17/09112811/jajak-pendapat-litbang-kompas-mayoritas-publik-menerima-hasil-pemilu?page=all>, diakses pada tanggal 26 september 2019 pukul 02.01 WIB

pipres 2019, sebanyak lebih dari 50% pendukungnya menerima hasil pemilu 2019. Jajak pendapat tersebut dipublikasikan oleh litbang pada senin (17/6/2019). Pengumpulan pendapat ini dilakukan melalui telepon pada 27-28 Mei 2019. Sebanyak 536 responden dipilih secara acak bertingkat di 17 kota besar di Indonesia. Jumlah responden ditentukan secara proporsional di setiap kota. Tingkat kepercayaan 95% dengan *margin of error* $\pm 4,2\%$...”⁸⁰

Dari berita yang dipublikasikan oleh akurat.co pun peneliti melihat tidak ada sama sekali juga perbedaan terkait topik pembahasan, tema serta isi yang dimuat dalam kabar elektronik oleh akurat.co ini. Media ini bahkan dengan jelas menutup kalimat yang dimuat tersebut dengan kalimat penegasan yang menyatakan:

“...Seperti diketahui, dari hasil pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf menang. Namun paslon Prabowo-Sandi tidak terima dengan hasil tersebut dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sidang gugatan mulai digelar pada jum'at (14/6/2019).”⁸¹

Secara tekstual, kalimat penegas yang ditulis oleh wartawan di media tersebut ingin menggambarkan fakta yang terjadi yang dilakukan oleh tim Prabowo-Sandi yang kemudian di jelaskan dengan data-data yang di paparkan di media tersebut. Tujuan dari media tersebut mempublikasikan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini adalah agar publik dapat melihat hasil legitimasi masyarakat berdasarkan hasil survei dan kemudian tujuan lainnya adalah agar dapat meredam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pendukung Prabowo yang tidak menerima hasil perhitungan suara

⁸⁰ Litbang Kompas: 53 Persen Pendukung Prabowo-Sandi Menerima Hasil Pilpres 2019, <https://akurat.co/news/id-658067-read-litbang-kompas-53-persen-pendukung-prabowosandi-menerima-hasil-pilpres-2019>, diakses pada tanggal 26 september 2019 pukul 09.44 WIB

⁸¹ *ibid*

yang dirilis oleh KPU pada malam hari. Karena, Indonesia adalah negara yang memiliki iklim sosial politik yang terus mengalami turunan-naik yang semua dengan kondisi tersebut rentan terjadinya berbagai masalah.⁸²

Selain dari itu, power terbesar dari media yang dapat menjangkau masyarakat yang berada dipelosok negeri digunakan agar tidak terjadi kekhawatiran para pendukung Jokowi-Ma'ruf yang resah ketika terjadi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandi yang kemudian di waktu tertentu akan menimbulkan perpecahan bangsa yang meskipun dengan dikeluarkan rilis hasil survei tersebut pun masih menimbulkan gejolak masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, hasil survei tersebut sengaja di *priming* oleh media massa untuk mengurangi tindakan gejolak yang semakin membesar jika tidak diredam dengan menggunakan berita tersebut.

Pada tahun 2019 Indonesia banyak sekali mengerahkan serta membiayai pasukan siber alias buzzer untuk memanipulasi opini publik yang beredar.⁸³ Pernyataan ini bukan berarti memberikan tuduhan kepada calon presiden Jokowi maupun Prabowo namun ditujukan kepada semua elit politik. Hal ini terlihat ketika banyaknya media yang mempublikasikan berita baik dari hasil survei maupun

⁸² Adi Permana Sidik dkk, *Media dan Dinamika Sosial Politik Indonesia*, Purwokerto: Yayasan Literasi Bangsa & FISIP Universitas Jenderal Soedirman, hal. 20

⁸³ Liberty Jemadu, Peneliti Oxford: Di Indonesia Ada Pengerahan Buzzer untuk Manipulasi Publik, <https://www.suara.com/teknologi/2019/10/03/175605/peneliti-oxford-indonesia-biaya-buzzer-untuk-manipulasi-publik> diakses pada tanggal 14 oktober 2019

berita yang beredar terkait hasil pemilu 2019. Sangat sulit membedakan mana yang benar-benar sesuai fakta yang terjadi dengan pembelotan fakta yang dibentuk oleh media.

B. Dampak dari Penggunaan *Framing* dan *Priming* Oleh Pasangan Calon Presiden Jokowi- Ma'ruf Pada Pemilihan Presiden 2019.

Ketika media menyebarkan informasi, tentu hal tersebut tidak serta merta sebenarnya sesuai dengan apa yang terjadi dengan kejadian faktual di lapangan. Semua itu perlu pengkajian yang mendalam terkait makna dan isi informasi yang disampaikan tersebut dalam realitas antara media dengan yang terjadi di lapangan akan terdapat dua dimensi besar antara penyeleksian isu dan penekanan atau penonjolan sebuah aspek yang tertentu yang terdapat dalam berita di media.⁸⁴ Namun, sebenarnya penyeleksian isu dan penonjolan sebuah aspek tersebut merupakan dua perbedaan yang antara penyeleksian isu disebut sebagai *framing* dan penonjolan sebuah aspek dalam melontarkan sesuatu disebut sebagai *priming*.

Media massa bukan sekedar penyampaian informasi apa adanya kepada masyarakat, bahkan dalam disiplin ilmu politik media massa sering menampilkan informasi dan berita yang tergantung kepada kelompok dan ideologi yang mendominasinya. Kemudian, apapun yang dihasilkan dan ditampilkan oleh media merupakan representasi dari ideologi media massa tersebut. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh media massa, maka

⁸⁴ Robert M Entman, *Framing : Toward Clatification of a Fractired Paradigm*, 43, no. 4 Northwestern university (Autumn, 1993), hlm. 51.

lembaga-lembaga politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, organisasi pemerintah, dan lain sebagainya seringkali memanfaatkan media massa untuk tujuan-tujuan politik tertentu.⁸⁵

Dampak *framing* dan *priming* terhadap pola pikir masyarakat tidak sesederhana yang dibayangkan, dampak pembentukan pola *framing* dan *priming* memiliki dampak yang sangat besar dan memiliki kurun waktu yang panjang. Dapat kita lihat ketika pada saat pemilihan presiden 2014 Jokowi terpilih menjadi presiden republik indonesia yang di kenal sebagai sosok presiden yang sederhana dan merakyat. Metro TV membuat program acara “Presiden Pilihan Kita” pada 9 juli 2014. Judul Presiden Pilihan kita menampilkan hasil pemberitaan quick count untuk Jokowi-JK 52,96% dan Prabowo-Hatta 47,04%.⁸⁶ Meskipun dalam pemilihan presiden 2014 TV One juga menyiarkan hasil quick count yang dirilis Prabowo-Hatta memenangkan pilpres 2014 dengan perolehan 50,19% dan Jokowi-JK 49,81%. Namun, dalam sidang gugatan sengketa pilpres dimenangkan oleh Jokowi-JK.

Dari kejadian tersebut, kemudian mempengaruhi pola fikir masyarakat dengan landasan yang kuat bahwa Jokowi telah memenangkan sidang putusan MK terkait sengketa pilpres. Maka, semakin kuat alasan para pendukung Jokowi-JK memilihnya dan tidak hanya sesederhana itu,

⁸⁵ Gema Mawardi. *Pembingkaihan Berita Media Online (Analisis Framing Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011)*, Skripsi ilmu Komunikasi, Depok: Perpustakaan FISIP UI, t.d, hlm. 14

⁸⁶ Ayub Dwi Anggoro, Media, Politik dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman Tentang Hasil Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV), *Jurnal Aristo*, Vol. 2, No. 2, juli 2014, hlm. 45

masyarakat indonesia yang mayoritas masih memiliki pendidikan rendah masih menyukai Jokowi hingga menjelang pillpres 2019. Karena semua itu terjadi ketika masyarakat sudah mempercayai berita-berita yang telah di framing tersebut.

Tingkat elektabilitas Jokowi masih unggul dibandingkan Prabowo terutama pada segmen pemilih yang memiliki latar belakang pendidikannya masih rendah yakni lulusan SD atau tidak lulus sekolah sama sekali.⁸⁷ Dalam per tahun 2018 persentase pendidikan yang bahkan masih buta huruf terbilang masih cukup banyak populasinya seperti contoh papua kurang lebih 30% .⁸⁸ Persentase tersebut dapat menjadi salah satu referensi untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.

Begitu pula dengan pilpres yang terjadi pada 2019, konsep partai emak-emak yang diusung oleh Prabowo-Sandi belum berhasil. Berdasarkan exit poll yang dilakukan oleh indikator Jokowi mendapatkan suara perempuan sebesar 50,7%, Prabowo-Hatta 48,4% dan litbang kompas 55% dari total pemilih perempuan yang diwawancarai.⁸⁹ Semua itu bisa di klasifikasikan sebagai bentuk *framing* dan *priming* yang dibventuk beberapa media yang dirilis oleh lembaga survei LSI Denny JA. Namun, belum tentu hasil exit poll tersebut bisa menjadi patokan bahwa

⁸⁷ Indikator: Basis Pendukung Jokowi Berpendidikan Rendah dan prabowo dari Kalangan Berpendidikan Tinggi, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/03/17442981/indikator-basis-pendukung-jokowi-berpendidikan-rendah-prabowo-dari-kalangan>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2019

⁸⁸ <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/22/1056/persentase-penduduk-buta-huruf-menurut-kelompok-umur-2011-2018.html> diakses pada tanggal 15 oktober 2019

⁸⁹ Callistasia Wijaya, Siapa saja yang memilih Jokowi dan Prabowo berdasarkan exit poll dan quick count?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48019930>, diakses pada tanggal 03 oktober 2019

benar-benar mayoritas perempuan yang memilih Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Karena dalam pengambilan sampling yang dilakukan oleh lembaga survei tidak sepenuhnya melainkan hanya sebagian saja.

Framing dan *priming* yang dilakukan oleh media yang memiliki ideologi yang sama dengan Jokowi-Ma'ruf dengan menggunakan hasil survei politik memiliki dampak yang tidak sederhana, dampak yang dikeluarkan sangat luas dan memiliki jangka panjang karena membentuk pola pikir masyarakat. Dampak yang terjadi adalah pada saat pilpres 2019 secara jelas kita lihat dari mulai awal pencalonan, proses pemilihan hingga pasca pilpres 2019 telah selesai masih terbagi menjadi dua kubu antara kubu Jokowi-Ma'ruf dan kubu Prabowo-Sandi.

Kelompok yang pertama adalah kelompok yang percaya, kelompok yang percaya adalah kelompok yang terkena dampak dari *framing* dan *priming*. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak percaya, kelompok tersebut merupakan kelompok yang tidak terkena dampaknya. Kedua kelompok tersebut terbelah karena ada faktor lain juga yang mempengaruhi yaitu kinerja personal dan kinerja calon.⁹⁰ Selain itu, dapat kita lihat secara rasional pada pemilihan presiden 2019 memang hanya terdapat dua calon presiden. Maka, masyarakat yang mempunyai jiwa partisipatif terhadap politik khususnya pemilu, secara nyata jelas berpihak terhadap salah satu pasangan calon presiden.

⁹⁰ Arya Fernandes. (2018). Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas, *CSIS Election Series No.1*, Jakarta : Center For Strategic and International Studies, hlm. 2.

Pada saat pilpres 2019 yang terbagi menjadi dua kelompok tersebut secara jelas dapat kita lihat ketika dua hastag yang terlihat menjadi viral menjelang pemilihan presiden 2019 dan kelompok tersebut dapat kita lihat dengan jelas ketika muncul tagar di media sosial. Kelompok pertama adalah yang memunculkan #2019GantiPresiden dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang memunculkan #jokowilagi dan #jokowi2periode. Namun, semua itu tidak lah dapat kita klasifikasikan sebagai bagian dari *black campaign*. Itu semua merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, selagi gerakan ini tidak menjadi detonator untuk menghancurkan lawan politiknya.⁹¹

Dampak yang ditimbulkan oleh *framing* dan *priming* terhadap dua kelompok yang sedang berbeda pendapat tersebut, bagi yang menyukai sosok pemimpin negara seperti Joko Widodo akan semakin suka dan bahkan akan menjadi pendukung yang militan serta siap membela apapun yang terjadi. Sedangkan yang tidak menyukainya, akan semakin membenci dan akan selalu mencari celah untuk mengkritisi hasil kerja yang dilakukan oleh Joko Widodo. Antara kedua kelompok tersebut semua merasa paling benar dan tidak memperdulikan aspek lainnya, ketika salah satu dari kedua belah pihak tersebut melakukan kesalahan, pasti langsung menjadi *trending topic*, dan membuat publik membicarakan hal-hal yang sepele dan secara tidak sadar, energi positif dalam diri akan terkuras oleh

⁹¹ Sherly Nelsa Fitri, Pro Kontra Gerakan Tagar #2019GantiPresiden Sebagai Sarana Kampanye dalam Pemilu, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 tahun 2018, 284-303, hlm. 298

hal-hal kecil.⁹² Itulah dampak yang dimunculkan oleh media yang membentuk *friming* dan *priming*.

Peneliti akan menampilkan dua kelompok yang mengungkapkan ekspresinya di media sosial sebagai bentuk dampak *framing* dan *priming* yang kemudian membentuk pola pikir kedua kelompok ada yang semakin militan dan ada pula yang semakin tidak menyukainya, meskipun menjelang pelantikan beberapa hari hal tersebut maasih terlihat dampaknya:

Tabel 3.1 Dampak *Framing* dan *Priming* (#BesokMatikanTVSeharian)

No.	Nama Akun	Komentar
1	@samuelchelsib	Saya ingin bertanya kepada penggaung tagar #BesokMatikanTVSeharian, apakah kalau kalian mematikan televisi kalian selama seharian Presidennya bakal bukan Jokowi? Tetap Jokowi kan? Kejang-kejang kok sampai segitunya. Move on donk, Pilpres kan sudah lama selesai.
2	@galihholic	Ada hastag #BesokMatikanTVSeharian wkwkkwk Eh tonggg lo pikir kalo tv mati jokowi ga jadi dilantik ???? Wkwkkwk lucu beber
3	@nikiMagusta	Boro-boro matiin, Orang aku udah 5 tahun nggak nonton TV~ Jadi ga kenal juga ama artis pemerintah uhuy #BesokMatikanTVSeharian
4	@SugiKAWuloAlit	Replying to @rmol_id Surplus legalitas defisit legitimasi.

⁹² Khoirul Huda, Zulfa 'Azzah Fadhlika, Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2018, 547-562, hlm. 557

		#BesokMatikanTVSeharian
5	@Princess_Bawel	Kasian amat lu pada ya, udh jagoan lu kalah, udh itu jagoan lu gabung ke pemerintah, eh sekarang buat Hastag kaya beginian #BesokMatikanTVSeharian. Masih sakit hati tah lu haha Gmna pak menurut bapak yang buat Hastag beginian @DivHumas_Polri @jokowi
6	@ang_opik	Nonton tv cuma buat nonton liga 1 doank selain itu tv mati
7	@NugrahaWB06	Otw gedung MPR RI, dapet order dari bos.. Mau ajak yg lain tp lagi war.(Foto hero Mobile Legend, Kadita/ nyi roro kidul)
8	@RoseIndah	Sekalian hemat listrik ahhhh..
9	@zaldyPoetra	Sepanjang sejarah pelantikan bukan disaksikan rakyat tp, aparat dan kroninya. #BesokMatikanTVSeharian #JualTVmu #TVpembodohan
10	@luqmancha	Wes ra sudi nonton tv ket mbien. (sudah tidak sudi nonton tv dari dulu)
11	@NisaBila8	Pekok di plihara. hanya para pekok yang #BesokMatikanTVSeharian tidak mau terima kenyataan kekalahan
12	@A_Muzamm	Ini Tagar #BesokMatikanTVSeharian Paling Stres Sedunia. Kasihan sekali ya MEREKA... Istighfar Saudaraku... Mari Kita Bersama Bahagia...
13	@Defrizon_indra	Besok mau istrht total .. tv dimatiin, HP di kunci sampe benar-benar Aman.
14	@dudikpras	pengen skip langsung senin
15	@maulinaantika3	Yang milih setan Yg nyambut pelantikan setan juga, hahaha
16	@Adanadiatuh	Ya ampun kalo ada #BesokMatikanTVSeharian , berarti ga bisa terima banget sih

		kekalahan dalam demokrasi:(Duh manusia
17	@Meowmeo21508841	Yaudah matiin aja tv nya toh dah basi dari masa masa pemilu kemarin juga gini, gak ngaruh juga cuih, Kadal Gurun sifatnya kek anak anak.#BesokMatikanTVSeharian
18	@Rudi_Totti	Udah siap beli siaran TV Satelit supaya tidak usah lihat si dia lagi...bayar buat 5tahun di depan.
19	@Kangdin2_81	Ada Himbauan dari kardun #BesokMatikanTvSeharian, Lihat ini aja kejang2 apalagi lihat pelantikan Presiden Terpilih Bisa2 Stroke Berjamaah. Repot amat sih idup kardun. Nyook ah kita #PestaRakyatNKRI
20	@AryaLubis	Lebih baik main PS dari pada nonton : jelang pelantikan presiden.
21	@TegarJuel	Sehari tanpa TV gak masalah bahkan anak2 setuju saat denger alasannya. 1. Hemat listrik 2. Ada yg pengen diakui dengan cara2 bathil
22	@brad_ridwan	Acatra gak mutu..
23	@RizalNoerX	Presiden Alam Gaim, merasa takut tanda curang karena #BesokMatikanTVSeharian
24	@PutriMa62775852	Good bye democracy, wellcome democrazy
25	@riswandi-an	Mungkin jika dulu yang berpesta rakyat, saat ini aparat pesta NKRI.

Sumber: twitter (tranding topic pada tanggal 19 oktober 2019)

Selain itu ada pula tagar yang muncul dan kembali menjadi *tranding topic* dan menjadi perbincangan para netizen yang ada di media sosial. Tagar nya adalah:

Tabel 3.2 Dampak *Framing* dan *Priming* (#PresidenAlamGaib)

No.	Nama Akun	Komentar
1	@YogL4dy	Jokowi Malam-malam ke DPR, Ada Apa? Mungkin datang menyapa Pasukan dari negeri wakanda Namanya juga #PresidenAlamGaib pasti mo ketemu rakyat nya
2	@Pejuang_Langit	Hari ini pelantikan #PresidenAlamGaib
3	@azmy_shabrina	yg dilantik hari ini #PresidenAlamGaib Aku sama kamu berada di alam nyata bkn mkhluk gaib, iya kan?
4	@RafiAzmi13	Udah tau ingkar janji masih aja mau dijanjiin #PresidenAlamGaib
5	@arinipertiwi2	Harusnya hari ini masyarakat euforia dgn event pelantikan. Entah dimana para pendukung beliau kemarin yg katax banyak beut. #PresidenAlamGaib
6	@RatuHaluworld	Manggil ratu pantai selatan dan sebagainya kira - kira ada tumbalnya ga sih? Kalau ada siapa ya.. #PresidenAlamGaib
7	@OchimTakesih	Hari ini cebong bangga akan kedunguannya #PresidenAlamGaib
8	@Nisyahsyaras	Di liat dari wajaha2nya ghoib semua Pantas menang tapi jadi #PresidenAlamGaib
9	@Ijonk_ZR	Td presiden mana ya yg dilantik? Serius tanya #PresidenAlamGaib
10	@robinHo87731807	Selamat pelantikan #PresidenAlamGaib :)
11	@Mail_khar	#PresidenAlamGaib yang bernama Rem Kadoti. Dia mampu menciptakan/mengutarakan JANJII2 di depan khalayak ramai walau sebenarnya itu semua hanya tipu muslihat untuk mendapatkan kepopuleran. Simsalabim jadi apa? Entahlah.
12	@_pena_alfath	Ya salam Pada senang amat yang dapat undangan pelantikan

Sumber: twitter (tranding topic pada tanggal 20 oktober 2019)

Dari beberapa daftar komentar diatas adalah contoh bentuk dampak *framing* dan *priming* yang penulis cantumkan menjadi tabel. Dapat dilihat sampai menjelang pelantikan dan terjadinya pelantikan pada tanggal 20 oktober 2019, antara kedua kelompok masih saling menyerang di media sosial. Jika seseorang aktif dalam dalam menerima informasi yang didapat dan ketika pola pikir seseorang telah dimodifikasi oleh media, maka seseorang tersebut dapat menginterpretasikan informasi tersebut serta beradaptasi dengan pengalaman tersebut dan konsepsi mengenai dunia yang sudah dimiliki.⁹³ Artinya, orang yang terkena dampak dari media tersebut pun mampu mempengaruhi orang lain disekitarnya dengan kemampuan pengetahuan yang ia miliki melalui media-media dalam menyebarkan informasi.

Meskipun pada saat pelantikan presiden Prabowo-Subianto menghadiri acara tersebut. Namun para pendukungnya tidak semua yang mengikuti arus Prabowo. Yang dahulu mendukung Prabowo pada saat pilpres pun ada yang tidak menyetujui kerukunan tersebut karena dampak yang dtimbulkan oleh media dimana ketika seseorang sudah tidak lagi melihat seseorang dari sisi baik, maka semua akan terlihat buruk dan tidak ada sisi positif yang dapat dinilai dari sudut pandang orang yang menilai tersebut.

⁹³ Kathleen M. Galotti, *Cognitive Development: Infancy through Adolescence* (edisi ke 2), CA : Sage Publication. Inc, 2017, hal. 54

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mengenai Hasil Survei Politik Sebagai Alat *Framing* dan *Priming* Kemenangan Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin Pada Pilpres 2019 maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam upaya membentuk kemenangannya salah satu cara adalah dengan menggunakan media. Alat yang digunakan media adalah Hasil Survei Politik yang di rumuskan sebagai alat *Framing* dan *Priming*.

Framing dan *Priming* digunakan untuk mengcounter isu-isu politik yang beredar di masyarakat tertuju kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin pasca Pemilihan Presiden 2019. Isu-isu politik yang beredar diantaranya adalah elektabilitas pasangan calon presiden, hasil perhitungan suara pada pilpres 2019, dan legitimasi politik pasca penetapan hasil penghitungan suara pilpres 2019.

Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dengan adanya *Framing* dan *Priming* adalah terbentuknya dua kelompok yang diantaranya kelompok yang percaya terhadap *Framing* dan *Priming* Jokowi-Ma'ruf dan kelompok yang tidak percaya. Kemudian, untuk kelompok yang percaya akan semakin menyukai sosok Jokowi dan kelompok yang tidak percaya akan semakin tidak suka terhadap Jokowi serta tidak memberikan legitimasi terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Seharusnya pola yang dibentuk lebih *smoth* agar menjadi *counter* isu yang maksimal.
2. Sangat disayangkan dampak yang timbul tidak terlihat dalam bentuk gerakan sosial militansi positif yang membangun, melainkan dampak negatif yang muncul.
3. Bagi para kandidat yang akan mencalonkan diri pada kontestasi pemilu direkomendasikan menggunakan pola ini.
4. Bagi masyarakat, harus lebih cermat dan teliti dalam mengkonsumsi berita di media.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Cangra, Hafied, (2009). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ellis, Andrew dkk, *Desain Sistem Pemilu: Buku Pnduan Baru International IDEA*, terj. Noor Cholis Swedia : Stockholm
- Eriyanto, (2018). *Media dan Opini Publik Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkaiian(Framing) dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Arya Fernandes. (2018). *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas, CSIS Election Series No.1*, Jakarta : Center For Strategic and International Studies
- Hennesy, Bernard, (1989). *Pendapat Umum*, terj. Amiruddin Nasution, Jakarta : Erlangga.
- Husein, Harun, (2015). *API PEMILU: Menuju Smart Election*, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.
- J.A, Denny, (2006). *Napak Tilas Reformasi Indonesia, Talk Show Dialog Aktual Radio Delta FM*, Yogyakarta : LKIS Yogyakarta.
- Kopel, (2013). *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan, Penelitian Kerjasama Kemitraan dan Kopel*.
- Labolo, Muhadam & Ilham, Teguh, (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- M. Galotti, Kathleen, (2017). *Cognitive Development: Infancy trough Adolescence* (edisi ke 2), CA : Sage Publication. Inc
- Muchtar, Adinda Tenrianke, dkk, (2015). *Sketsa Pemilu 2014 : Antara Subtansi, Proses dan Kenyataan (Kumpulan Artikel Terpilih)*, Jakarta : The Indonesian Institute.
- Prastowo, Andi, (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

Pulungan, J. Suyuti, (1994). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

_____, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Raco, J. R, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, Jakarta : PT. Grasindo.

Reynold, Andrew, dkk, (2005). *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, Swedia: Stockholm.

_____, 2001 Andrew Reynold, “Merancang Sistem Pemilihan Umum” dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, Bandung: Mizan

Sidik, Adi Permana dkk, *Media dan Dinamika Sosial Politik Indonesia*, Purwokerto: Yayasan Lliterasi Bangsa & FISIP Universitas Jenderal Soedirman

Sobur, Alex, (2006). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Toha, Miftah, (2014), *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bagian (b), merujuk kepada amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Citra Umbara Bandung, 2003.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

C. JURNAL

Anggoro, Ayub Dwi, (2014). *Media, Politik dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman Tentang Hasil Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV)*, Jurnal Aristo, Volume 2. Nomor 2.

- Ansor, (2011). *Teori Agenda Setting dan Citra Pemerintah: Analisis Pemberantasan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintahan SBY*, Jurnal Komunikasi, Volume 5. Nomor 2, Hal 145-156.
- Entman, Robert M, (1993). *Framing : Toward Clatification of a Fractired Paradigm*, Volume 43. Nomor 4
- Fitri, Sherly Nelsa, (2018). *Pro Kontra Gerakan Tagar #2019GantiPresiden Sebagai Sarana Kampanye dalam Pemilu*, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Halaman 284-303
- Holilah, Ilah, (2016). *Dampak Media Terhadap Perilaku Masyarakat*, Volume 3. Nomor 1.
- Huda, Khoiril & Fadlika, Azzah, (2018). *Pemilu 2019 : Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa*. Volume 4. Nomor 3.
- Marzuki, Suparman, (2008). *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis*, Jurnal Hukum, Volume 15. Nomor 3, Halaman 393-412.
- Mudjiyanto, Bambang, (2012). *Literasi Internet dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Dalam Aktifitas Pemanfaatan Media Baru*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, volume 16. Nomor 1.
- Ratnamulyani, Ike Atikah & Maksudi, Beddy Iriawaan, (2018). *Peran Media sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humanior, Volume 20. Nomor 2.
- Rully, (2018). *Efektivitas Iklan Negatif di Media Sosial dalam Politik di Indonesia*, Jurnal FISIP, Volume 6. Nomor 1, Halaman 69-79.
- Siagian, Haidir Fitra, (2015). *Pengaruh dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik dalam Membentuk Opini Publik*. Jurnal Al-Khitabah, Volume 2. Nomor 1.
- Solihah, Ratnia, (2018). *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 3. Nomor 1, Halaman 73-88.
- Widowati, Dewi, (2012). *Efek Media Massa Terhadap Khalayak*, Jurnal Adzikra, Volume 03. Nomor 1.

D. SKRIPSI

Batari, Andi Dwi Wahyu. (2017). *Kekuatan Politik Media Sosial dalam Kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bulukumba Tahun 2015*, Skripsi Ilmu Politik, Makassar: Perpustakaan Unhas.

Mawardi, Gema. *Pembingkaihan Berita Media Online (Analisis Framing Berita Mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011)*, Skripsi ilmu Komunikasi, Depok: Perpustakaan FISIP UI

Viani, Avindiary Novalinda. (2017). *Media Baru dan Partisipasi Politik (Pengaruh Twitter Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Remaja Dalam Pilkada Serentak 2015 pada Mahaiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2014)*, Skripsi Ilmu Komunikasi, Surakarta: Perpustakaan Fikom Universitas Surakarta.

E. WEBSITE

Akuntono, Indra, (2014). *7 Peristiwa Politik Sepanjang 2014*, diakses dari www.nasional.kompas.com tanggal 1 juli 2019.

Bps, (2018). *Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur*, diakses dari www.bps.go.id tanggal 15 oktober 2019

Chamidah, Siti, (2009). *Pemilu 2009, Pemasaran Politik dan Lembaga Survey*, diakses dari www.umpo.ac.id tanggal 4 juli 2019.

Detik, (2019). *Partai apa yang dipilih milenial ibu kota ? median membuktikan*, diakses dari www.detik.com tanggal 8 juli 2019.

_____, (2019). *Jajak Pendapat Kompas : 53,5% Pendukung Prabowo Terima Hasil Pemilu*, diakses dari www.detik.com tanggal 25 september 2019.

Firmansyah, Heri, (2019). *Dugaan Kecurangan Pemilu Turunkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat*, diakses dari www.rri.co.id tanggal 28 september 2019

Haryanto, Ibnu, (2019). *Survei SMRC: 69% Publik Menilai Pilpres 2019 jurdil*, diakses dari www.detik.com tanggal 28 september 2019

- Jemadu, Liberty, (2019). *Peneliti Oxford: Di Indonesia Ada Pengerahan Buzzer untuk Manipulasi Publik*, diakses dari www.suara.com tanggal 14 oktober 2019
- Kompas, (2009). *Survey LSI: Elektabilitas Jokowi capai 71 persen* diakses dari www.nasional.kompas.com tanggal 8 juli 2019.
- _____, (2019). *Indikator: Basis Pendukung Jokowi Berpendidikan Rendah dan Prabowo dari Kalangan Berpendidikan Tinggi*, diakses dari www.nasional.kompas.com tanggal 01 oktober 2019
- Maharani, dian & Aritonag, Detri Robeka, (2014). *Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014*, diakses dari www.nasional.kompas.com tanggal 30 juni 2019.
- Nathaniel, Felix, (2019). *Tolak Hasil Peilpres 2019, BPN: Demonstrasi Tetap Jala*, diakses dari www.tirto.id tanggal 03 oktober 2019
- Prabawa, Lanang Putra, (2014). *Lembaga Survey: Antara Integritas, Kekuasaan dan Komersial*, diakses dari www.news.detik.com tanggal 8 juli 2019.
- Purnamasari, Niken, (2018). *Perang Tagar Jokowi dan Prabowo Usai Pengundian Nomor Urut*, diakses dari www.news.detik.com tanggal 3 juli 2019.
- Makdori, Yopi, (2019). *LSI Denny JA: Jokowi-Ma'ruf Unggul di Segmen Emak-Emak*, diakses dari www.liputan6.com tanggal 01 oktober 2019
- Muhammad Radityo, (2019). *Prabowo Kalah di Quick count Pilpres 2019, pendukung serukan Matikan TV*, diakses dari www.merdeka.com tanggal 18 oktober 2019
- Ridhoi, M. Ahsan, (2018). *Amien Rais dan Fadli Zon Bahas Pertarungan ulang Jokowi vs Prabowo*, diakses dari www.tirto.id tanggal 1 juli 2019.
- Rini, Citra Listiya, (2014). *Ini Hasil Lengkap Rekapitulasi Suara Pilpres 2014*, diakses dari www.republika.co.id tanggal 30 juni 2019.
- Saubani, Andri, (2018). *Survey LSI: PDIP Berpotensi Menang di pemilu 2019* diakses dari www.republika.co.id tanggal 8 juli 2019.
- _____, (2019). *Survei: Prabowo-Sandi Unnggul di Kalangan Pemilih Terpelajar*, diakses dari www.republika.co.id tanggal 2 oktober 2019

Setya W, Rahayu, *Biografi Metro TV*, diakses dari www.merdeka.com tanggal 19 september 2019

Wijaya, Callistasia, (2019). *Siapa saja yang memilih Jokowi dan Prabowo berdasarkan exit poll dan quick count ?*, diakses dari www.bbc.com tanggal 03 oktober 2019